

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
DESA PADA PROGRAM BLT-DD DI MASA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten
Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

OLEH:

YULI MULYANI

C1C018130

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU**

2022

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
DESA PADA PROGRAM BLT-DD DI MASA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten
Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Bengkulu Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Akuntansi**

OLEH:

YULI MULYANI

C1C018130

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BENGKULU

2022

**Skripsi oleh Yuli Mulyani ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

Bengkulu, 23 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. Fachruzzaman SE., MDM., Ak. CA., Asean CPA., CertiPSAS

NIP. 19710313 199601 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. E Lismawati SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 19750217 200312 2 001

Bengkulu, 23 Juni 2022

Skripsi oleh Yuli Mulyani ini

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada, 23 Juni 2022.

Ketua Penguji,

Anggota Penguji I,

Dr. E Lismawati SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 19750217 200312 2 001

Dr. Fachruzzaman SE., MDM., Ak. CA.,
Asean CPA., CertiPSAS
NIP. 19710313 199601 1 001

Anggota Penguji II,

Anggota Penguji III,

Madani Hatta SE., M.Si. Ak. CA
NIP. 19820820 200604 1 014

Abdullah SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 19680728 199802 1 001

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman SE., MDM., Ak. CA., Asean CPA., CertiPSAS
NIP. 19710313 199601 1 001

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Sedikit lengah saja, kereta yang kita tarik akan tergelincir turun ke bawah bukit”

(Master Cheng Y)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

- **Sang Maha Segalanya, Allah SWT**
- **Pedoman hidupku, Nabi Muhammad SAW**
- **Bapak Parmin, Ibu Parmi, Saudara sekandungku Mbak Misgiyanti dan Dek Faris Nizar Hamizan**
- **Sahabat tersayang dan terkasih ku serta orang-orang yang selalu mendoakan serta menginginkan yang terbaik untukku.**
- **Seluruh keluarga besarku**
- **Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan serta teladan yang sangat berharga.**
- **Keluarga besar gedung K tercinta**
- **Alamamater ku, Universitas Bengkulu**

Special Thanks To:

- Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah hamba, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi pedoman hidup.
- Yuli Mulyani yang telah kuat menghadapi setiap tahap kehidupan dan perkuliahan. Terimakasih sudah bertahan Yuli, kamu hebat. Sudah tahu kan tahap selanjutnya seperti apa?.
- Bapak Parmin dan Ibu Parmi terimakasih atas mental, tenaga, finansial, semangat, semoga Bapak dan Ibu diberkahi umur panjang dan kebahagiaan dunia akhirat atas setiap jasa yang telah terlaksana pak, buk.
- Mbak Misgiyanti, dek faris Nizar Hamizan terimakasih atas doa baik untukku.
- Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Fachruzzaman S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA., CertiPSAS terima kasih atas semua waktu, pengalaman, saran dan masukkan yang berharga selama bimbingan skripsi.
- Ibu Dr. E. Lismawati SE., M. Si., Ak., CA, Bapak Madani Hatta, SE., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Abdullah SE., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Fadli, S.E., M.Si., Ak., CA. yang telah membantu dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
- Ibu Dr. E Lismawati SE., M.Si., Ak. CA dan Ibu Lisa Martiah NP. S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu, beserta seluruh staf yang telah memberikan rekomendasi dan memfasilitasi penulis untuk dapat menulis tugas akhir mahasiswa (Skripsi).
- Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati dan membagi ilmu pengetahuan sebagai

bekal bagi penulis dalam pengembangan keilmuan maupun penyelesaian Skripsi ini. Pemerintah Kecamatan Pinang Raya yang telah menyambut dan mengizinkan serta merekomendasikan penulis dalam melakukan penelitian di desa-desa di Kecamatan Pinang Raya

- Pemerintah Desa Sumber Mulya, Pemerintah Desa Gunung Payung, Pemerintah Desa Bukit Harapan, Pemerintah Desa Bumi Harjo, Pemerintah Desa Bukit Makmur, Pemerintah Desa Marga Bakti dan Pemerintah Desa Air Sekamanak yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, menjawab dan memberikan hal terkait dengan penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
- *Member of Instinct 2018*, terimakasih sudah mengajarkan arti ambis yang sesungguhnya, semoga kita bisa reuni dengan cerita kenangan yang mengesankan, Aamiin.
- Sahabatku, Nurlyta Fauziyah yang selalu ada dalam 4 tahun di masa kuliah, *how lucky i am to have u.*
- Sahabat terkasihku Martini, Nurrahmah, Mbak Reni, Setpa Juniar terima kasih segala bantuannya.
- Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang selalu memberikan kemudahan dan membantu dalam layanan administrasi perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me at all times. Good Job Yuli.



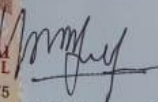
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai bagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan




Yuli Mulyani
NPM. C1C018130

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN THE BLT-DD PROGRAM IN THE COVID-19
PANDEMIC**

(Case Study in Pinang Raya Municipality, North Bengkulu Regency)

**Yuli Mulyani¹⁾
Fachruzzaman²⁾**

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of Village Fund Management in The BLT DD Program in the Covid-19 Pandemic Period (Case Study of Pinang Raya Municipality, North Bengkulu Regency) which includes program planning, program implementation and reporting of the BLT DD program. Measurement of program effectiveness in this study uses Campbell's (1970), namely program success, target success, program targets, input and output levels, and overall goal achievement. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, including the data reduction stage, the data presentation stage and the conclusion drawing stage. The results showed The management of the Village Fund as well as the reallocation and refocusing of the BLT DD Program budget at the planning, implementation and reporting stages of the program can be said to be effective with no obstacles in the three stages, and adjustments always follow existing rules and regulations. Other successes can also be seen from the effectiveness of all measurement results on the success of the BLT DD program in the Village Government of Pinang Raya District, as evidenced by no problems in determining KPM, communities in all villages in Pinang Raya Municipality, KPM provide good feedback with this program, assisted KPM with this program. The success of the target is met with all KPM included in the existing criteria, satisfaction with the program is shown that the amount of assistance is sufficient to help KPM in meeting economic needs so that it can be said that KPM is satisfied with the existence of this program, in measuring the suitability of inputs and outputs, with the planned KPM the same with what is realized, and the fulfillment of the last effectiveness measurement, namely the achievement of the overall goal of containing the results of this program helping to improve the economy of the villagers.

Keywords: Village Fund Management, Program Effectiveness, BLT DD

- 1) Candidates Bachelor of Accounting
- 2) Supervisor

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PROGRAM BLT-DD DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

**Yuli Mulyani¹⁾
Fachruzzaman²⁾**

RINGKASAN

Pandemi Covid-19 yang telah menurunkan perekonomian nasional yang juga telah berdampak pada masyarakat kecil di pedesaan, pemerintah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan yaitu realokasi dan refocusing anggaran desa, yang salah satu programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dengan adanya permasalahan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT DD di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

Penelitian ini menganalisis cangkupan perencanaan program, pelaksanaan program dan pelaporan program BLT DD, dengan pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas Campbell (1970) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan menggunakan wawancara terstruktur hingga mencapai jawaban sama (berulang) dari informan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi perbedaan alokasi dan fokus anggaran, dimana sebelum pandemi Dana Desa difokuskan pada pembangunan fisik desa, pemberdayaan masyarakat dan program lainnya. berbeda pada saat pandemi yang difokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19 yang salah satunya yaitu Program BLT DD, hasil penelitian di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program BLT DD sudah dapat dikatakan efektif dengan tidak adanya kendala dalam ketiga tahap tersebut, dan penyesuaian selalu mengikuti peraturan dan regulasi yang ada. Keberhasilan lainnya juga dapat dilihat dari efektifnya seluruh hasil pengukuran pada keberhasilan program BLT DD di Pemerintahan Desa Kecamatan Pinang Raya dibuktikan dengan tidak ada masalah dalam penentuan KPM, masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten memberikan *feedback* baik dengan adanya program ini, KPM yang terbantu dengan adanya bantuan ini. Keberhasilan sasaran terpenuhi dengan seluruh KPM yang termasuk dalam kriteria yang ada, kepuasan terhadap program ditunjukkan bahwa jumlah bantuan cukup membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa KPM puas dengan adanya program ini, dalam pengukuran kesesuaian input dan output, dengan KPM yang direncanakan sama dengan yang direalisasikan, dan terpenuhinya pengukuran

efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh memuat hasil program ini membantu perekonomian warga desa.

Terlaksananya program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu program yang telah terlaksana pada pengelolaan dana desa 2021, dimana dengan berhasil dan efektifnya program ini memberikan dampak positif dalam pelaksanaan program-program pemerintah lainnya, keberhasilan ini dapat diadopsi pelaksanaannya dan dapat meningkatkan kinerja keberhasilan Program Pemerintah, dan bagi masyarakat dengan adanya program BLT DD ini dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa, oleh karena itu masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat transparansi kepada masyarakat

Saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah desa, dengan efektifnya program BLT DD dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program desa lainnya, dan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang membandingkan dengan kecamatan lainnya, atau menambah indikator pengukuran lainnya, serta dapat menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Efektivitas, BLT DD

- 1) Calon Sarjana Ekonomi (Akuntansi)
- 2) Pembimbing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)” Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Akuntansi (S.Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu (Unib). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Retno, S.E., M.Sc. Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu .
2. Bapak Dr. Fachruzzaman SE., MDM., Ak. CA., Asean CPA., CertiPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu serta Pembimbing Utama telah mengarahkan, membimbing, meluangkan waktu, memberikan banyak kemudahan, memberikan masukan, keteladanan serta motivasi kepada penulis dan telah memberikan kesempatan dan izin dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Ibu Dr. E Lismawati SE., M.Si., Ak. CA dan Ibu Lisa Martiah NP. S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu, beserta seluruh staf yang telah memberikan rekomendasi dan memfasilitasi penulis untuk dapat menulis tugas akhir mahasiswa (Skripsi).
4. Tim Penguji mulai dari tahap proposal sampai dengan proses saat ini, Ibu Dr. E Lismawati SE., M.Si., Ak. CA., Bapak Madani Hatta SE., M.Si., Ak. CA dan Bapak Abdullah, S.E., M.Si. Ak., CA. Terima kasih

telah memberikan masukan dan saran naskah mulai dari proposal penelitian hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Fadli, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing peneliti selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan Ibu dan Bapak mendapatkan keberkahan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dengan dapat dialamatkan ke yulimuliani470@gmail.com. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 23 Juni 2022

Penulis,

Yuli Mulyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	xi
RINGKASAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Efektivitas	11
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	15
2.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	35
3.2 Objek Penelitian dan Informan Penelitian.....	36
3.2 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36

3.3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4 Metode Analisis.....	42
3.5 Uji Kualitas Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Pelaksanaan Penelitian.....	45
4.1.2 Pemerintah Desa di Kecamatan Pinang Raya.....	46
4.1.3 Informan Penelitian.....	47
4.1.3 Temuan Penelitian	50
4.2 Pembahasan	69
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi dan kaitannya dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah Desa.....	69
4.3.2 Perencanaan program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya.....	71
4.3.3 Pelaksanaan Program BLT DD.....	72
4.3.4 Pelaporan Program BLT DD	72
4.3.5 Pengukuran Efektivitas Program BLT DD	73
PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Implikasi	81
5.3 Saran	82
5.4 Keterbatasan Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kemiskinan Bengkulu Utara Tahun 2019-2021	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Tupoksi Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jarak Antar Desa dengan Ibukota Kecamatan Pinang Raya 2021	46
Tabel 4.2 Daftar Informan Penelitian.....	47
Tabel 4.3 Daftar Instansi Pemerintah.....	48
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Pinang Raya 2020	49
Tabel 4.5 Total KPM yang direkam Januari 2021	55
Tabel 4.6 Data Dana Desa Kecamatan Pinang Raya 2021	60
Tabel 4.7 Data KPM BLT DD Kecamatan Pinang Raya.....	61
Tabel 4.8 Bulan Realisasi BLT DD kepada KPM	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Musdesus	59
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	80
Lampiran 2 Tabel Observasi Penelitian	84
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara dan Reduksi Data	85
Lampiran 4 Daftar KPM BLT DD	113
Lampiran 5 Dokumentasi Musdesus dan Wawancara	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 membuka pola pemikiran seluruh sektor di dunia. Terjadi perubahan diberbagai bidang yang sebagian besar dibarengi inovasi dan kelugasan setiap negara untuk meminimalisir dampak negatif di bidang kehidupan. Dunia yang semula tertata rapi diharuskan bergelung pada ketidaknyamanan sistem pemerintahan yang ada. Dimulai dari bidang kesehatan yang merambah ke bidang-bidang lain hingga pada bidang yang sangat dirasa penting pada tatanan suatu negara yaitu bidang ekonomi.

Data BPS Tahun 2021 mengungkapkan bahwa 27,54 juta orang atau mereka yang memiliki tingkat kemiskinan 10,14 persen dari jumlah penduduk nasional. Dibandingkan tahun lalu, jumlah penduduk miskin meningkat 0,36 persen pada Maret 2020 atau setara dengan 1,12 juta. Data dari BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2021 menunjukkan Provinsi Bengkulu berpenduduk miskin sebanyak 306.000. Jumlah penduduk miskin meningkat 3.420 dibandingkan Maret 2020.

Sementara itu, Data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara menunjukkan angka persentase kemiskinan yang menurun, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kemiskinan (Persen) Bengkulu Utara Tahun 2019-2021

Wilayah	Kemiskinan (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Bengkulu Utara	11,65	11,67	11,61

Sumber: BPS Bengkulu Utara

Terlihat bahwa kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 kemiskinan 11,65% namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen yang menjadi 11,67%, yang kemungkinan meningkat akibat bencana Covid-19, dan di tahun 2021 tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,61%.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan anggaran dan belanja negara, dengan begitu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk dengan adanya realokasi anggaran serta refocusing anggaran. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 hingga lapisan terkecil dalam masyarakat. Pandemi Covid-19 telah membuat tertahannya sebagian besar anggaran belanja pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintahan dalam upaya realokasi anggaran dan penyesuaian (*refocusing*) terhadap program-program pemerintah. Fokus utama dengan adanya penyesuaian program pemerintah pada masa pandemi ini yaitu: sebagai jaring pengaman sosial, layanan kesehatan dan penanggulangan dampak dalam bidang perekonomian masyarakat. Kenyataan pada kondisi saat ini, pembelanjaan anggaran tersendat karena problem institusional dan situasional terkait pandemi Covid-19. Terdapatnya beberapa masalah terkait ketepatan penyesuaian program dari kemampuan penyerapan (realisasi) dari anggaran tersebut. Hal ini menghambat program pemulihan ekonomi nasional (Kemenkeu, 2021a).

Pengelolaan Dana Desa dimulai dengan tahap perencanaan setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dengan mengalokasikan Dana Desa, dengan perencanaan yang matang dan diperkirakan tepat dan cepat serta efektif

selanjutnya yaitu pelaksanaan setiap program yang dinilai dengan berdasarkan pada regulasi atau peraturan yang berlaku dan kegiatan akhir dari pengelolaan program ini yaitu pelaporan program BLT DD (PMK 222/No. 07/2020).

Penilaian efektivitas dari program ini sangat penting bagi sektor publik dimana sangat menyangkut kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalamnya terdapat unsur efektivitas. Penilaian efektivitas diperlukan untuk menganalisis berhasil atau tidaknya program pemerintah yang bisa dijadikan acuan dan keberbaikan pada program-program pengelolaan selanjutnya.

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam penanggulangan Covid-19 pasca kebijakan realokasi anggaran dan refocusing terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program BLT DD berada pada skala prioritas pemanfaatan sumber daya Dana Desa 2021 dan merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional bagi masyarakat pedesaan yang terkena dampak Covid-19. Penerima manfaat dari program dana sosial istimewa ini adalah mereka (masyarakat) yang tergolong tidak mampu dan terdampak dalam pandemi Covid-19.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pembangunan dan Imigrasi ke-13 Daerah Tahun 2020 tentang Prioritas Pemanfaatan Sumber Daya Desa pada tahun 2021 yaitu pada Pasal 1 (18) mengatur bahwa BLT DD adalah program berbasis desa yang memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan persyaratan yang disepakati dan keputusan musyawarah desa.

Pada Pasal 39 ayat 1 PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa dan pada pasal 39 ayat (6) disebutkan Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 Bulan

Kecamatan Pinang Raya adalah salah satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan kecamatan pecahan dari Kecamatan Ketahun, yang resmi dibuka pada tahun 2015. Kecamatan Pinang Raya terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penduduk Kecamatan Pinang Raya 2020

	Desa	Penduduk
1	Air Simpang	1,656
2	Air Sebayur	5,259
3	Air Sekamanak	1959
4	Marga Bhakti	2.750
5	Bukit Makmur	4.143
6	Bukit Harapan	3.387
7	Gunung Payung	370
8	Tanjung Muara	1.145
9	Sumber Mulya	1,412
10	Bumi Harjo	1,383
	Kecamatan Pinang Raya	23.464

Sumber: BPS dan BPMPD

Jumlah penduduk terbesar adalah Desa Air Sebayur dengan jumlah penduduk 5.259 jiwa, disusul oleh Desa Bukit dengan jumlah penduduk 4.143 jiwa. Desa terkecil di wilayah Pinang Raya adalah Desa Gunung Payung dengan jumlah penduduk 370 jiwa. Dengan jumlah kondisi geografis yang tak sama, sumber daya alam, sumber daya manusia yang berbeda. Pada umumnya, penduduk Pinang Raya bermata pencaharian sebagai petani petani sawit, karet dan buruh.

Kajian sebelumnya yang diteliti oleh Anna (2021), penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program BLT DD dimasyarakat yang telah diungkapkan peneliti dengan observasi mandiri yang telah dilakukan dan dengan membaca rujukan dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT di Desa Pener telah berhasil, dimana pelaksanaannya tepat waktu dan keterlibatan pengawas dalam pelaksanaan program BLT positif. Namun program BLT di Desa Pener tidak berjalan efektif sementara ada penerima BLT karena masih ada warga yang dianggap mampu secara finansial namun mendapatkan BLT. Kendala yang dihadapi dalam program BLT di Desa Pener adalah adanya pengaduan dari masyarakat yang menilai bahwa penerima BLT ini belum tepat sasaran. Pengukuran efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Irfan Sofi (2021) yang dilatarbelakangi BLT Dana Desa yang merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93 persen.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Katarina (2021), sama seperti penelitian rujukan sebelumnya, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh realokasi dan refocusing anggaran pemerintah termasuk pemerintah desa terkhususnya dalam program BLT DD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas penyaluran BLT di Desa Sirnajaya dan menjelaskan hal-hal yang dapat menghambat penyaluran bantuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan langsung di wilayah desa Sirnajaya Sukabumi dalam hal ini pemerintah desa melalui dana desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada penghambat dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Ertien (2019), hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matriks sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu telah menjalankan kewenangannya baik dari aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi menggandeng Pendamping PKH dalam implementasi PKH untuk mengentaskan kemiskinan Peserta PKH. Dengan demikian menjadi lancar karena syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan di bidang pendidikan (peserta tetap sekolah) dan di bidang kesehatan (tetap penjaminan kesehatan jangka panjang).

Restu, dkk (2021) dengan tujuan penelitian menganalisis identifikasi dan evaluasi isu-isu yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana desa Kabupaten Sumedang dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini melihat lingkungan atau SDM dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang telah berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam kabupaten Sumedang, antara lain prioritas yang mempengaruhi manfaat, tingkat perbaikan yang diperlukan, peran pembuat kebijakan dan implementasi program, sumber daya yang digunakan, serta kekuatan dan strategi para pemangku pemerintahan. Kualitas kelembagaan serta kapasitas dan respon serta kurangnya sumber daya dimanfaatkan dan desa bergantung sepenuhnya pada APBDes, ADD dan sumber pendanaan lain untuk pengembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian terdahulu sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penulis memfokuskan penelitian pada tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa pada BLT-DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini juga untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT-DD agar dapat berjalan dengan efektif.

Melakukan analisis dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program BLT DD, serta pelaporan dari program BLT DD.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Adanya pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan upaya keputusan langsung untuk mengatasi dampaknya. Instruksi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk melakukan upaya realokasi anggaran dan penyesuaian (*refocusing*) terhadap program-program pemerintah. Salah satu program yang dicetuskan karena adanya pandemi ini yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak bencana Covid-19 untuk menempatkan mereka yang terbantu secara finansial dan lainnya.

Penelitian ini menganalisis dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari program BLT DD. Penilaian efektivitas diperlukan untuk penilaian berjalan dengan efektif atau tidaknya program BLT DD yang telah terlaksana di Kecamatan Pinang Raya. Maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa pada program BLT-DD dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program dan pelaporan program di masa pandemi covid-19 pada Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan visi, misi dan penambahan teori serta pengetahuan khususnya terkait analisis efektivitas pengelolaan dana desa pada program BLT-DD di masa pandemi Covid-19 pada Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Secara Praktis

Dalam pelaksanaannya, peneliti berharap kajian ini dapat memberikan hasil positif yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman di daerah lain baik penerapannya serta untuk program atau kegiatan lainnya:

- a. Bagi Peneliti

Kajian ini sangat transparan dan membuka peluang bagi para sarjana untuk mengkaji isu dan efektifitas yang melatarbelakangi efektivitas pengelolaan dana desa pada program BLT-DD di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, yang dapat menambah pengetahuan peneliti tentang kebijakan pemerintah yang diterapkan dan dilaksanakan.

- b. Pemerintahan Desa

Kajian efektivitas pengelolaan dana desa pada program BLT-DD di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten

Bengkulu Utara serta dapat menjadi acuan dasar pengelolaan Dana Desa terhadap program-program lainnya.

c. Masyarakat

Kajian ini memberikan informasi, menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai analisis efektivitas pengelolaan dana desa terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang telah berjalan di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, referensi dan acuan agar lebih baik dan lebih lengkap khususnya dalam kebijakan sektor publik dan program pemerintah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari masalah yang ada dan dapat lebih terukur serta terarah. Penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa pada program BLT-DD di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan menelusuri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dengan terlengkapinya semua aspek penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada semua prinsip yang ada. Menurut UNDP (Rosidin, 2010: 179), prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas berbasis kesepakatan, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dan visi strategis. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka harus terpenuhinya salah satu prinsip yaitu efektivitas.

Interpretasi Supriyono tentang efektivitas bukunya Sistem Manajemen adalah hubungan antara produksi pusat tanggung jawab dan tujuan yang dicapai, itu masih merupakan faktor terpenting yang berkontribusi pada biaya pencapaian tujuan tersebut sehingga dapat dikatakan efektif (2000:29). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dan menunjukkan seberapa efektif unit/program tersebut.

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program atau diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penafsiran efektivitas oleh Hari Lubis dan Martani Husein (1987:55) mengungkapkan bahwa

efektivitas merupakan kunci untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, misalnya suatu organisasi dikatakan efektif dimana tujuan tersebut ada dan bahwa

perkiraan target telah ditetapkan. Kajian mengenai efektivitas menurut Hidayat (1986), yang menyatakan: Efektivitas adalah ukuran tingkat pencapaiannya (kualitas, mutu dan waktu). Semakin tinggi persentase tujuan yang dicapai, semakin besar efektivitasnya. Efektivitas adalah cara terbaik untuk mengetahui seseorang menciptakan hasil yang memenuhi harapan. Artinya, jika suatu tugas diselesaikan tepat waktu, dari segi output dan *quality* dapat dikatakan efektif (Ravianto, 2014:11) dan juga pengertian efektivitas menurut Amin (1993:32) efektivitas adalah hasil yang diperoleh dan telah dilakukan dengan benar.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tujuan utama suatu program yang menunjukkan: Semakin banyak hasil yang diperoleh, semakin efektif pula program atau kegiatan tersebut. Penelitian ini menunjukkan apakah suatu program efektif atau tidak untuk menentukan seberapa besar manfaat atau dampak program tersebut terhadap keberhasilan. Efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini dapat digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan kelanjutan atau penghentian suatu program.

Pendekatan efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program atau organisasi menurut Gibson, Donnelly, dan Ivancevich (1997: 27-29) dalam Organisasi (terjemahan) menunjukkan bahwa konsep transparansi terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis tujuan dan pendekatan sistem. Pendekatan tujuan untuk menentukan dan menganalisis efektivitas, berdasarkan gagasan bahwa organisasi adalah jalan yang harus ditempuh. Sedangkan pendekatan sistem, produktivitas adalah kemampuan organisasi untuk

mengembangkan produk atau tujuan yang konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu:

1. Produksi, didefinisikan sebagai rasio produksi.
2. Efisiensi, kepuasan menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau seberapa murah hati dengan pelanggan dan staf.
3. Adaptasi, melihat sejauh mana organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal organisasi.
4. Kepuasan, organisasi memanfaatkan setiap peluang dengan investasi jangka panjang dengan tujuan berpegang pada prinsip bisnis.
5. Pengembangan organisasi, organisasi dapat berkelanjutan, harus dapat beroperasi tanpa batas.

Sedangkan menurut Amitai Etzioni (dalam Indrawijawa, 2010:187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria:

1. Adaptasi
2. Integrasi
3. Motivasi
4. Produksi

Mengukur efektivitas suatu program tidaklah sederhana dan langsung, tetapi harus dievaluasi dengan cara yang berbeda dan tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menjelaskannya. Ihyaul MD Ulum (2004:294) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari hasil yang dicapai oleh organisasi. Efektivitas diukur dengan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai atau tidak mencapai

suatu tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan lebih dari yang ingin dicapai secara efektif.

Efektivitas ini tidak menentukan ukuran atau ruang lingkup biaya, tetapi efektivitas dengan mempertimbangkan bahwa program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Siagian (1978) mengungkapkan kriteria untuk mengukur efektivitas dalam mencapai tujuan yaitu:

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai
2. Mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan
3. Proses dan analisis kebijakan terstruktur
4. Desain yang akurat
5. Akses ke tempat kerja dan infrastruktur
6. Implementasi yang efisien dan efektif
7. Sistem kontrol dan pemantauan

Selanjutnya pengukuran efektivitas menurut Campbell JP (Mutiarin, 2014) yaitu:

1. Keberhasilan Program: Program BLT DD akan berhasil khususnya di Pinang Raya, Bengkulu Utara, jika program tersebut dapat membantu membangun kembali perekonomian keluarga miskin di masa pandemi Covid-19.
2. Keberhasilan Sasaran: keberhasilan ini tercermin dalam efektivitas yang telah dinilai dalam tahap perencanaan program, pelaksanaan dan pelaporan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap program BLT DD.

3. Kepuasan terhadap program: Respon KPM puas dengan program BLT DD yang dilihat dengan adanya timbal balik, pengaruh, dan kesesuaiannya pelaksanaan dengan regulasi.
4. Tingkat input dan output: dari input berupa perencanaan program BLT DD dan luaran berupa kontribusi serta tanggapan positif yang ditentukan oleh keluarga penerima manfaat menunjukkan efektivitas program serta laporan program.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh: Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat dan program bekerja secara efektif.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pengelolaan adalah seperangkat kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, evaluasi dan pembinaan yang cukup, pemantauan dan pengendalian. Manajemen bukan sekedar pelaksanaan tindakan, tetapi kumpulan tindakan yang mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang memiliki kekayaan perseorangan desa. Kepala desa bertanggung jawab menyusun pedoman pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa), mengangkat pejabat untuk memungut pendapatan desa, menyetujui pengeluaran yang terdaftar di APBDesa, dan bertanggung jawab atas desa untuk kegiatan yang lainnya atas APBDesa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2.1.2.1 Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa berkenaan dengan topik pembahasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dasar hukum pelaksanaan meliputi:

1. Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kemendagri, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

3. Kemendes, PDT dan Transmigrasi, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti menetapkan Permendes, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2021 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;

Pengelolaan dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas untuk pengembangan dan penguatan masyarakat (UU No. 60 Tahun 2014 pasal 19).

2.1.2.2 Prinsip pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan yang dilakukan dalam APBDes, oleh karena itu pada prinsipnya pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan di desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, untuk itu dalam pengelolaannya harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan yang partisipatif, dana desa mulai dari perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi harus melibatkan semua pihak, baik dari unsur Elit Desa (Jajaran Pemerintah Desa), maupun masyarakat lainnya (petani, buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya), dimana pihak secara terbuka berkenalan dengan seluruh rangkaian proses.

2. Akuntabel, Seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap pengusulan peruntukan, pelaksanaan sampai dengan tahap pencapaian hasil, harus bertanggung jawab karena dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat.
3. Transparan, semua proses pengelolaan dana desa harus dibarengi dengan keterbukaan yang memungkinkan seluruh masyarakat mengetahui dan memiliki akses informasi yang seluas-luasnya mengenai masalah keuangan desa.
4. Ketertiban dan Disiplin, Anggaran pengelolaan dana desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan landasan pengelolaan atau permasalahan desa.
5. Kesenjangan, Seluruh elemen desa atau seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Filosofi dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan adanya pemerataan pembangunan yang dicapai di desa dengan pelayanan publik yang lebih banyak, ekonomi desa yang maju mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta masyarakat ini juga dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan tidak hanya dijadikan sebagai basis pembangunan. sebagai objek yang sedang dibangun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam tersebut diatur 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik, yang sebenarnya harus dilaksanakan sebagai ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan daerah yang disusun terlebih dahulu oleh sekretaris desa mengenai APBDes berdasarkan RKP Desa tahun yang bersangkutan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati oleh badan permusyawaratan desa. Setelah draf dibahas dan disetujui oleh kepala desa bersama dengan badan penasihat desa, draf yang telah disepakati disampaikan kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 3 hari setelah penilaian disepakati.

2. Implementasi atau pelaksanaan

Setelah rencana terbentuk, pimpinan harus membimbing dan mengarahkan staf/bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Pelaksanaan APBDesa terkait dengan pendapatan desa.

3. Penatausahaan

Administrasi ditangani oleh bendahara desa. Setiap pendaftaran dan pengeluaran, menutup buku setiap akhir bulan dengan tertib dan bendahara wajib mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh bendahara.

4. Pelaporan

Laporan pelaksanaan dalam APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota yang merupakan laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk

laporan semester akhir disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. .

5. Pertanggungjawaban

Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya dengan menggunakan papan buletin radio komunitas, atau dengan membuka forum untuk umum atau dengan menggunakan sarana informasi lainnya. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan, keuangan desa sangat kecil dan barang publik terbatas, tetapi uang diperlukan untuk membiayai banyak pekerjaan dan kegiatan di desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka good governance, dana desa harus dikelola dengan baik.

Anggaran adalah pusat pertemuan antara politik dan administrasi publik, dan merupakan proses di mana nilai-nilai yang bertentangan tersebut diterjemahkan ke dalam program atau melalui alokasi sumber daya yang langka untuk tujuan program. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek manajemen personalia yang menghubungkan lingkungan politik eksternal dan kegiatan inti seperti analisis jabatan, uraian tugas, penilaian jabatan dan penghargaan.

2.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

2.1.4.1 Pengertian BLT DD

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah program kompensasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu masyarakat miskin (Wibawa, 2009: 76). BLT-DD merupakan program dari Dana Desa kepada keluarga miskin di desa untuk meminimalisir dampak bencana Covid-19. BLT DD telah ditambahkan ke dalam skala prioritas Anggaran Dana Desa 2021, dengan berlanjutnya program pemerintah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak ekonomi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.

Tujuan utama program Bantuan Langsung Dana Desa adalah: pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan pemerintah desa, dukungan program nasional prioritas menurut pemerintah desa. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan mereka yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 222 tahun 2020, yang mengatur bahwa BLT DD harus diberikan kepada mereka (Keluarga Penerima Manfaat) yang memenuhi kriteria: keluarga miskin yang tinggal di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian (penghasilan yang tidak mencukupi sampai tiga bulan), anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis. Sedangkan penerima manfaat program disepakati dan ditetapkan melalui Musdesus (Musyawarah desa khusus). Musdesus membahas mendiskusikan target sasaran dan jenis program bantuan tidak tumpang tindih target sasaran. Penetapan

sasaran dan penerima BLT-Dana Desa ini dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan gotong-royong.

Seperti yang tercantum PMK 222/PMK.07/2020, jaring pengaman sosial bagi pemulihan ekonomi khususnya pada masa bencana Covid-19, dengan dicanangkannya program BLT Dana Desa yang mengutamakan penggunaan dana desa. Besaran BLT DD adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas dari Keluarga Penerima Manfaat, yang diperkirakan dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu setiap bulan selama tahun 2021.

Sistem distribusi BLT DD dilakukan dengan pemerintah desa dalam memutuskan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, siapa yang menjadi penerima dana BLT-Desa, memilih pendataan secara efisien, terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Proses pendataan rumah tangga miskin dan penerima BLT-Dana Desa serta penentuan hasil pendataan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

- a. Pemerintah desa menyiapkan segala informasi terkait masyarakat desa tentang usia, pendidikan, kesejahteraan, pendapatan/status ekonomi, kesehatan dan disabilitas.
- b. Perangkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa membuat dan menyerahkan kertas kerja kepada relawan desa dan/atau tim kerja COVID-19 untuk pendataan keluarga miskin yang dicalonkan BLT Dana Desa yang ditetapkan sebelumnya

- c. Petugas BLT DD atau gugus tugas setidaknya harus ada 3 orang pendata, dan jika lebih jumlahnya harus ganjil.
 - d. Pemerintah juga mengumpulkan data dari standar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menggunakan formulir pendataan yang disediakan oleh aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh proses pengumpulan data harus mengikuti protokol kesehatan.
2. Proses konsolidasi dan verifikasi
- a. Relawan desa atau gugus tugas yang sudah terbentuk kemudian mengumpulkan hasil pendataan RT, RW atau desa dan melakukan verifikasi dan tabulasi data tersebut.
 - b. Selain itu, satgas memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lansia dan difabel.
 - c. Setiap kali keluarga miskin disaring dan diidentifikasi, penting untuk mengambil gambar dan mencatat keberadaan lokasi mereka.
 - d. Jika KPM ternyata termasuk keluarga termiskin yang paling mungkin menerima pembayaran BLT-Desa tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas akan mendaftarkan dan mendaftarkannya dan menyerahkannya kepada pemerintah desa. Untuk itu, telah diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKD).
 - e. Hasil pemeriksaan dan pendataan dikirim ke kepala desa.
3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan.
- a. Kepala Desa memberikan wewenang dan izin kepada BPD untuk melakukan musyawarah desa secara privat dengan mengundang

perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu memverifikasi dan menyetujui informasi terkait penerima manfaat BLT Dana Desa.

- b. Berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa dan BPD menyusun daftar keluarga miskin yang dicalonkan untuk dana BLT- Dana Desa. Desa-desa tersebut membagikan BLT-Dana Desa sesuai dengan daftar yang tersedia.
- c. Kepala Desa menyebarkan penerima BLT-Dana Desa yang telah disetujui kepada masyarakat melalui panitia informasi desa dan/atau lokasi strategis yang mudah dijangkau. Desa juga dapat menggunakan jaringan desa atau sistem informasi desa.
- d. Jika daftar calon penerima BLT-Dana Desa menjadi pengaduan masyarakat, desa bersama BPD akan mengadakan rapat desa untuk membahas pengaduan dan menyepakati solusi. Daftar kemungkinan dana BLT Desa akan diumumkan dan dikonfirmasi oleh Bupati atau dapat diwakili Camat. Sebelum mengalokasikan untuk bulan kedua, desa harus memastikan data penerima BLT dari Dana Desa disetujui.

Landasan hukum yang akan digunakan sebagai pedoman acuan pelaksanaan program BLT-DD:

1. Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19
2. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan

keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease (covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
6. Instruksi menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT DD
7. Instruksi menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu BLT DD yang menyelenggarakan musyawarah desa khusus
8. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

9. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
10. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
11. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

2.2 Penelitian Terdahulu

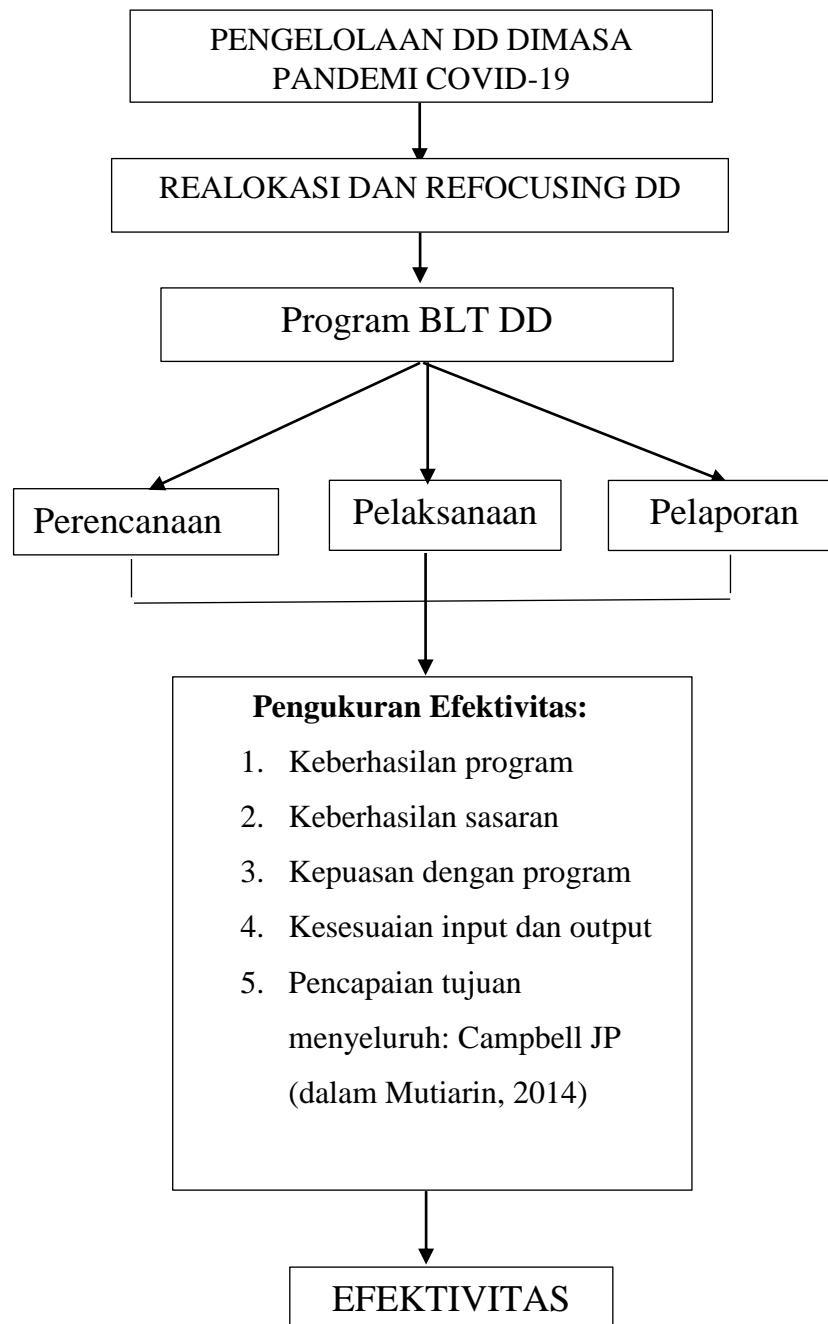
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan dan Kesimpulan Penelitian
1	Anna Fatchiyatur Rizqi (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2020	Mengetahui pelaksanaan program BLT di Desa Pener, apakah pelaksanaan program BLT di Desa Pener sudah berjalan efektif dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan program BLT di Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal	Dengan Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara	Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pelaksanaan Program BLT di Desa Pener sudah berjalan dengan baik, dimana waktu pelaksanaan sudah berjalan tepat waktu, dan kehadiran pengawas dalam pelaksanaan program BLT yang baik. Namun program BLT di Desa Pener belum berjalan efektif dimana penerima BLT yang belum tepat sasaran karena masih ditemukan adanya masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi namun mendapatkan BLT. Kendala yang dihadapi dalam program BLT di Desa Pener adalah adanya pengaduan dari masyarakat yang menilai bahwa penerima BLT ini belum tepat sasaran
2	Irfan Sofi (2021)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa	Mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93

				deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa	persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran
3	Kantarina Rachaju (2021)	Effectiveness of Cash Assistance (BLT) for Communities Affected by The Pandemic Covid-19: Case Study in Simajaya village, Cibadak Sub-district, Sukabumi District.	Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penyaluran BLT di Desa Sirnajaya. Pelaksanaan program penyaluran desa dan keluarga harapan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan hal-hal yang dapat menghambat penyaluran bantuan.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data tiga dimensi.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan langsung di wilayah desa Sirnajaya Sukabumi dalam hal ini pemerintah desa melalui dana desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat yaitu: pemberdayaan desa Sirna Jaya. Masyarakat dengan meningkatkan kontribusi keuangan langsung untuk kebutuhan sehari-hari.
4	Cahyo dan Ertien (2019)	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Batu	Menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping

					PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matriks sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada Pendamping PKH untuk membantu Peserta PKH dalam memberikan penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH.
5	Restu, Ummu dan Ikin (2021)	Village Fund Policy Implementation Strategy in Sumedang Regency	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan investasi desa desa Kabupaten Sumedang, serta strategi yang berlaku.	Penelitian ini melihat lingkungan atau SDM dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor telah berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam negeri Sumedang, antara lain prioritas yang mempengaruhi manfaat, tingkat perbaikan yang diperlukan, peran pembuat kebijakan dan implementasi program, sumber daya yang digunakan, serta kekuatan dan strategi para aktor. le. Kualitas kelembagaan serta kapasitas dan respon. Kurangnya sumber daya dimanfaatkan dan desa bergantung sepenuhnya pada APBDes, ADD dan sumber pendanaan lain untuk pengembangan masyarakat.

2.2 Kerangka penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif.. Peneliti harus mengunjungi subjek dan berkomunikasi dengan sumber data atau informan (Marzuki, 2005: 133). Sedangkan menurut Sugiyono (2015:7), metode kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivis, dimana peneliti mempelajari wilayah sumber data yang terpenting sebagai pengumpulan data. Terintegrasi pemicu analisis data dari suatu kegiatan. Hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ini lebih menekankan pada kepentingan daripada umumnya. Penelitian kualitatif bermaksud menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penulis memilih pendekatan ini, karena pendekatan ini mampu menemukan definisi, situasi dari gejala-gejala sosial dari subjek, perilaku, motif-motif subyektif, perasaan dan emosi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian studi kasus dengan menganalisis program BLT DD dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan penilaian studi berdasarkan pada tingkat positif dari pengelolaan DD pada program BLT DD yang termasuk di dalamnya dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari program ini. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti mendeskripsikan informasi yang diperoleh sebagai narasi tentang peristiwa sosial yang terkait dengan isu-isu yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Program BLT-DD di Masa Pandemi-Covid-19 (Studi Kasus Pada Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

3.2 Objek Penelitian dan Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:144), objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Program BLT DD di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yang di dalamnya meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan pelaporan program. Aktivitas penelitian berupa analisis efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada program BLT DD dengan menggunakan pengukuran efektivitas yang diungkapkan oleh Campbell (dalam Mutiarin 2014) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Sebagai subjek penelitian, informan diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara akurat. Informan yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang fenomena tersebut diteliti, mampu bercerita dengan baik dan benar mampu membantu peneliti dalam pengambilan data proses pengumpulan. Menurut Suyanto (2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi dasar dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini informan kunci adalah Pemerintah Desa
2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi. Informan utama dalam penelitian ini adalah KPM, Gugus Tugas
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang dipelajari. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah penduduk desa.

Penelitian ini dalam Informan yang terpilih yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, Petugas BLT DD dan KPM.

Tabel 3.1 Tupoksi Informan Penelitian

No	Informan	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai kepala pemerintahan desa, ia memimpin pemerintahan desa. 2. Melaksanakan pembangunan desa. 3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 4. Penanggungjawab setiap terlaksananya program dan seluruh kegiatan dari pengelolaan DD 5. Memelihara hubungan masyarakat dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya (hukum desa: Pasal 26).
2	Perangkat desa (sekretaris dan Kasi Kesejahteraan)	Membantu kepala desa dalam segala bidang pemerintahan desa.
3	Petugas BLT DD/RT/RW/Kadun	Pendataan keluarga miskin yang berhak menerima BLT Dana Desa
4	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Memberikan kesaksian dan menjawab pertanyaan dengan jujur atas semua pernyataan pihak pemerintah desa
5	Penduduk/Masyarakat Desa	Memberikan penilaian mengenai pelaksanaan program BLT DD

3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Langkah selanjutnya adalah mengekstrak data dari berbagai sumber, yaitu:

1. Data primer

Menurut Azwar (2004: 91), data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek suatu alat ukur atau alat pengambilan data atau langsung mengakses alat pengumpulan data pada subjek. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data dasar menunjukkan Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Maleong (132: 2006) menyatakan bahwa para peneliti melaporkan bahwa mereka terbiasa memberikan informasi tentang keadaan lingkungan penelitian dan mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman di bidang penelitian, sehingga mereka benar-benar perlu tahu atau menjadi bagian yang terlibat langsung dalam penelitian.

2. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang merujuk pada sumber lain, termasuk temuan penelitian berupa laporan teknis, buku dan laporan (Arikunto, 2008: 67). Sumber informasi ini diambil dari literatur berupa buku, laporan, dokumen, dan sumber lain yang relevan, termasuk Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Mandalis (2004:87) menyatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data, dalam hal ini cara data diperoleh dari sumber data, sumber data yang sedang dibahas menjadi subyek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh dengan metode sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode observasi menurut Sugiyono (2016:227) mengungkapkan bahwa peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan informan penelitian sebagai sumber data penelitian agar hasil yang didapat nantinya lebih akurat, tepat, lebih tajam. Peneliti menjadi *passive participation* yaitu peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti akan menggali data-data mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Program BLT-DD di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Metode wawancara

Mandalis (2004:109) mengungkapkan bahwa jenis wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara informal. Wawancara terstruktur dilakukan secara sistematis berdasarkan serangkaian wawancara yang sudah berpedoman pada wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah format wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bermanfaat. Dilakukannya wawancara dengan beberapa informan terpilih atau mereka yang memiliki informasi dan keterlibatan dengan data-data yang

diperlukan terkait penelitian mengenai program BLT DD dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Dalam melaksanakan wawancara ini, terdapat beberapa tahapan wawancara yaitu:

a. Tahap persiapan

1) Menyiapkan panduan wawancara sesuai prosedur Covid-19

Panduan wawancara dan observasi digunakan sebagai pegangan peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi dengan tujuan tidak menyimpang dari lingkup penelitian. Protokol ini juga akan membantu peneliti dalam mengingat aspek-aspek yang perlu digali dari setiap informan serta memudahkan mengkategorisasi analisis data.

2) Menyiapkan alat tulis dan catatan

Alat tulis dan catatan berfungsi sebagai alat mencatat manual semua percakapan dan informasi dari sumber data.

3) Menyiapkan alat perekam wawancara

Alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan selama wawancara sehingga dapat diperdengarkan ulang untuk analisis data dan juga untuk memotret dan memvideokan informan atau sumber data, sehingga dapat menghasilkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin.

4) Membuat dan mengirim surat izin penelitian kepada unit analisis yang dipilih

- 5) Merancang pertanyaan utama dalam kegiatan wawancara semi-terstruktur
- 6) Menghubungi informan untuk menentukan waktu dan tempat wawancara

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Menyiapkan tempat wawancara sesuai dengan prosedur Covid-19
- 2) Membacakan protokol wawancara semi-terstruktur
- 3) Menyerahkan lembar persetujuan menjadi informan dan menanyakan kepada informan kesediaan untuk direkam
- 4) Melakukan wawancara langsung berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan
- 5) Menyimpulkan hasil wawancara dan menanyakan kesediaan informan untuk dihubungi kembali untuk validasi data
- 6) Menutup sesi wawancara

c. Tahap Validasi Data

- 1) Mendengarkan ulang rekaman serta menyusun transkrip pembicaraan wawancara
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi transkrip pembicaraan kepada informan melalui tatap muka, email atau alat komunikasi lainnya
- 3) Menganalisis transkrip wawancara
- 4) Melakukan uji kualitas data dengan metode triangulasi data
- 5) Menyusun kesimpulan akhir penelitian

3. Metode dokumentasi

Peneliti akan menemukan informasi yang diperlukan seperti foto wawancara, surat, dokumen, aturan, file, dll terkait dengan pengelolaan Dana Desa terhadap program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

3.4 Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2016: 89) analisis data adalah proses mengekstrak dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, teks situs dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, membagi unit, menyusun dan mengkoordinasikan pola., memilih apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari dan menyimpulkan sehingga mereka memahami diri sendiri dan orang lain. Analisis data merupakan analisis yang didasarkan pada adanya hubungan yang sistematis antara variabel-variabel yang diteliti. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara masing-masing variabel penelitian yang akan digunakan dalam menanggapi suatu masalah yang dibuat oleh peneliti.

1. Reduksi data

Pengurangan data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengubah dan mengabstraksikan data yang muncul di dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis (Matthew & Huberman, 1994). Mitigasi data juga memberikan gambaran yang jelas tentang peneliti dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti. Dalam

penelitian ini, poin-poin kunci diperoleh dari data yang diperoleh dari hasil dan wawancara, serta poin-poin yang terkait dengan BLT DD

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Saat menyajikan data, biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram, dan sebagainya. Proposal disusun dan disusun agar lebih mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 95), yang biasa digunakan untuk menyajikan data penelitian secara berkualitas adalah penulisan narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Membuat atau mengkaji kesimpulan didasarkan pada data yang sudah ada sebelumnya, keputusan dibuat secara jelas dan lengkap dan memberikan panduan untuk menguji pentingnya informasi sehingga kesimpulan dapat dibuat kuat dan bertanggung jawab yang digunakan untuk mengambil tindakan. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara serta mendokumentasikannya. Data kemudian data ditinjau untuk alasan yang dapat diterima, setelah mengacu pada sumber yang digunakan. Selain itu, dengan memilah dan menganalisis data, data meminimalkan, disajikan dan disimpulkan.

3.5 Uji Kualitas Data

Keakuratan data dikembangkan untuk memastikan bahwa suatu penelitian dilakukan untuk menguji data yang diperoleh. Dalam bukunya (2014:270),

Sugiyono mengungkapkan bahwa pengujian validitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menjelaskan penelitian, yaitu dengan triangulasi digunakan untuk memverifikasi data dari berbagai sumber, data dan waktu, antara lain segitiga: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu (Sugiyono, 2007: 273).

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memvalidasi data dari berbagai sumber, yang menjadi sumber data untuk penelitian ini baik data primer dan data sekunder. Triangulasi hasil wawancara ini dilakukan dengan melakukan review terhadap dokumen pendukung maupun melakukan observasi untuk memastikan bahwa data yang telah didapat sesuai dengan realitas di lapangan. Proses triangulasi data ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari metode wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian

Kondisi geografis wilayah kecamatan Pinang Raya, sebagian besar daratannya berada di ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut yang membentang di bagian pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Sedangkan di sebelah timur, kondisinya berbukit-bukit dan lereng dengan ketinggian bervariasi antara 50-541 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 700,63 Km persegi. Kecamatan Pinang Raya merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Ketahun, dimana kecamatan Ketahun merupakan Induk dari beberapa kecamatan yang sudah mekar sebelumnya. Kecamatan Pinang Raya merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Kecamatan ini termasuk dalam kecamatan baru yang diresmikan pada 16 Juni tahun 2015 oleh pemerintah kabupaten Bengkulu Utara dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 7 Tahun 2015 tentang pembentukan kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Napal Putih dan Kabupaten Lebong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Giri Mulya dan Kecamatan Batiknau
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batiknau

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Ketahun

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Pinang Raya berjumlah sepuluh desa yaitu desa Air Sempang, Air Sebayur, Air Sekamanak, Marga Bhakti, Bukit Makmur, Bukit Harapan, Gunung Payung, Tanjung Muara, Sumber Mulya, Bumi Harjo. Letak dan jarak antar desa dengan ibu kota kecamatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Jarak Antara Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan di Kecamatan Pinang Raya Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Jarak (km)
1	Air Sempang	28.00
2	Air Sebayur	31.00
3	Air Sekamanak	25.00
4	Marga Bhakti	23.00
5	Bukit Makmur	18.00
6	Bukit Harapan	31.50
7	Gunung Payung	2.00
8	Tanjung Muara	29.00
9	Sumber Mulya	0.00
10	Bumi Harjo	3.00

Sumber: BPS Bengkulu Utara 2021

Ibu Kota Kecamatan Pinang Raya terletak di desa Sumber Mulya (D7), dengan jarak desa terjauh yaitu Desa Bukit Harapan dengan jarak 31.50 km, yang selanjutnya Desa Air Sebayur dimana desa ini merupakan ujung dari wilayah kecamatan Pinang Raya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Batiknau. Desa yang terdekat dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu desa Gunung Payung dengan jarak 2.00 km dan desa Bumi Harjo dengan jarak 3.00 km.

4.1.2 Pemerintah Desa di Kecamatan Pinang Raya

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari perangkat yang memiliki tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing, yang terdiri atas Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun. Kecamatan Pinang Raya dengan 6 desa terklasifikasi swadaya, dan 4 diantaranya sudah terklasifikasi swakarsa. Klasifikasi ini menunjukkan tingkat perkembangan setiap desa, dengan mempertimbangkan kemiskinan penduduk, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, angka kelahiran dan kematian, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti demografi, politik, sosial ekonomi. Sepuluh desa di kecamatan Pinang Raya sudah memasuki definitif, dalam hal ini seluruh desa sudah lepas dari desa persiapan.

4.1.3 Informan Penelitian

Tabel 4.2 Daftar Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia
01_MH	Kades Gunung Payung	Muhamad Hatta	L	35-55
02_AS	Kades Bumi Harjo	Agus Suhardi	L	35-55
03_HA	Kades Bukit Makmur	Hartono	L	35-55
04_KT	Kades Marga Bhakti	Katno	L	35-55
05_AD	Kades Air Sekamanak	Androngi	L	35-55
06_SH	Sekdes Sumber Mulya	Sri Hanto	L	35-55
07_AT	Sekdes Gunung Payung	Anton	L	35-55
08_IR	Sekdes Bumi Harjo	Irwanto	L	35-55
09_SG	Sekdes Marga Bhakti	Sugianto	L	35-55
10_GA	Kasi Kesejahteraan Bukit Harapan	Galih	L	35-55
11_DD	Kasi Kesejahteraan Bukit Makmur	Dedi	L	35-55
12_JS	Ketua RT	Jafar Shodiq	L	35-55
13_SR	Kadun	Suhar	L	35-55
14_ST	BPD	Siti	P	35-55
15_DW	KPM	Dewi	P	35-55
16_T	KPM	Ita	P	35-55
17_HA	KPM	Hamid	L	35-55
18_WR	KPM	Warto	L	35-55
19_AM	KPM	Ami	P	35-55
20_SM	KPM	Sarmuji	L	>55
21_KR	KPM	Kartoso	L	>55
22_SO	Masyarakat	Soim	L	30-40
23_PR	Masyarakat	Parmin	L	>50

Sumber: Data Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 informan yang terdiri dari 5 Kepala Desa, 4 Sekertaris Desa, 2 Kasi Kesejahteraan, 1 RT, 1 RW, 1 Kadun, 6 KPM dan 2 masyarakat. Informan dalam penelitian ini merupakan mereka yang terlibat langsung dalam program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya.

Tabel 4.3 Daftar Instansi Penelitian

Kode Instansi	Nama Instansi
PSM	Pemerintah Desa Sumber Mulya
PGP	Pemerintah Desa Gunung Payung
PBH	Pemerintah Desa Bukit Harapan
PBR	Pemerintah Desa Bumi Harjo
PBM	Pemerintah Desa Bukit Makmur
PMB	Pemerintah Desa Marga Bakti
PAS	Pemerintah Desa Air Sekamanak

Sumber: Data Penelitian

Pemerintah Desa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara berusaha melengkapi setiap fasilitas desa dengan mengupayakan pelayanan yang semaksimal mungkin, yang berdasarkan pada hasil observasi peneliti yaitu:

1. Sarana dan prasarana desa di Kecamatan Pinang Raya

Pemerintah desa berusaha memenuhi dan baik dalam penyediaan pelayanan sarana dan prasarana desa yang sangat diperlukan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu kantor desa terletak berada di tengah pemukiman masyarakat atau penduduk desa. Selain kantor Desa, pemerintah desa juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lainnya seperti sarana pendidikan yang ada mulai dari tingkat pendidikan PAUD, TK, SD, serta sarana kesehatan dan Bumdes, sarana dan prasarana di Kecamatan Pinang Raya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa di Kecamatan Pinang Raya 2020

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah
1	SD	19
2	MI	4
3	MTS	1
4	SMP	9
5	SMA	1
6	MA	1
7	Kantor Desa	10
8	Balai pertemuan Desa	10
9	Kendaraan desa	23
10	Puskesmas	3
11	Masjid	57
12	Mushola	58
13	Gereja	14
14	BUMDes	10

Sumber: BPS Bengkulu Utara

Berdasarkan dari tabel di atas dan observasi peneliti yang menunjukkan kondisi fisik kantor desa di Kecamatan Pinang Raya serta fasilitas kantor desa, sarana dan prasarana yang ada di desa Kecamatan Pinang Raya cukup memadai didukung dengan adanya pusat pendidikan hingga tingkat SMA, walaupun belum ada sekolah menengah kejuruan tapi dengan adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) ini sangat membantu masyarakat dengan jarak tempuh yang tidak jauh, bidang kesehatan yang juga memadai, serta tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang dirasa cukup membantu masyarakat.

2. Program BLT DD di Desa-Desa Kecamatan Pinang Raya

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan pada hasil observasi

peneliti dengan memberikan pertanyaan umum kepada perangkat desa mengungkapkan bahwa BLT DD di Desa-Desa Kecamatan Pinang Raya pertama diadakan pada tahun 2020 dimana BLT DD diberikan kepada masyarakat guna mengatasi dampak dari adanya pandemi Covid-19. Penyaluran BLT DD di desa-desa selalu diselenggarakan di Kantor Balai Desa dengan menggunakan protokol kesehatan. Program BLT DD diberikan atau diterima oleh masyarakat per KK atau per keluarga, dan besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat adalah sebesar Rp. 300.000/bulan yang diberikan selama 12 bulan berturut-turut. Program BLT yang diselenggarakan di desa-desa di kecamatan Pinang Raya ini diberikan langsung oleh perangkat desa yang ada yang kemudian biasanya di awasi oleh petugas dari Kecamatan maupun dari Polri guna mengawasi jalannya program BLT DD yang sedang berlangsung.

4.2.3 Temuan Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab 1, diantara tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program BLT DD. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka peneliti mendeskripsikan menjadi beberapa uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Masa pandemi Covid-19

Peneliti untuk mengetahui Pengelolaan dana desa di masa pandemi dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti

terhadap sebanyak 7 informan dari pemerintah desa di kecamatan Pinang Raya. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran sebelum pandemi dan pada saat pandemi.

Hal ini sejalan dengan pendapat informan 06/SH Pemerintah Desa Sumber Mulya (wawancara tanggal 10 Februari 2022) dijelaskan bahwa terdapat perbedaan Pengelolaan Dana Desa pada sebelum dan saat pandemi, pandemi yang dimulai di Indonesia pada tahun 2020 dan berlanjut hingga awal 2022 membuat fokus anggaran pada penyelesaian dampak pandemi. Jika sebelumnya Dana Desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, pada saat pandemi dialokasikan dan difokuskan pada desa tanggap covid dan jaring pengaman sosial serta program lainnya.

Selanjutnya jawaban selaras dari informan 01/MH Kepala Desa Gunung Payung (wawancara tanggal 10 Februari 2022) menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan Dana Desa di masa Covid-19 yaitu dibatasinya ruang gerak masyarakat, terutama dalam melakukan sosialisasi program dan hal-hal lainnya yang membutuhkan tatap muka. Antisipasi yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan penyesuaian. Tahap penyesuaian dilakukan dengan mengurangi hal-hal yang membuat perkumpulan, mengutamakan *social distancing* dan protokol kesehatan, serta penyesuaian program-program yang terlaksana dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, informan mengungkapkan bahwa dalam penyesuaian ini tidak amat

terkendala dan masih terarah dengan regulasi dan ditambah dengan kerja sama dari aparat desa dan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat hasil wawancara dari Informan 10/GA Kasi Kesejahteraan Pemerintah Desa Bukit Harapan (wawancara tanggal 10 Februari 2022) dijelaskan bahwa ada perbedaan pengelolaan DD sebelum dan pada saat pandemi, selain di pengelolaannya berbeda sebelumnya dari yang dianggarkan awal tahun, pada tahun 2021 sudah dianggarkan dengan lebih siap. Semua yang sudah direncanakan dengan baik tapi dialihkan ke sektor penanganan dampak pandemi. Kendala Pengelolaan Dana Desa yang dihadapi yaitu adanya libur PSBB, sosialisasi yang harus mematuhi protokol kesehatan, juga macam-macam hal yang harus dilakukan secara virtual. Informan mengungkapkan hal yang paling penting dalam Pengelolaan Dana Desa yaitu koordinasi. Semua program yang sudah direncanakan oleh pusat akan terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat, dan selama pandemi ini berjalan dengan baik dan mengatasi segala kendala yang ada dengan koordinasi yang baik.

2. Realokasi dan Refocusing Dana Desa Kecamatan Pinang Raya

Peneliti untuk mengetahui realokasi dan refocusing anggaran dana desa dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sebanyak 7 informan dari pemerintah desa di kecamatan Pinang Raya. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa realokasi dan refocusing anggaran dana desa untuk desa tanggap covid

dan juga jaring pengaman sosial serta adanya program BLT DD sebagai skala prioritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 02/AS (dalam wawancara tanggal 10 Februari 2022) dimana informan menyebutkan bahwa perubahan pengelolaan Dana Desa dari 2021, program dari pemerintah dan juga dana yang telah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi setelah sebelumnya kami melakukan perancangan dan perencanaan yang matang, kami bisa kondisikan masalah yang akan ditimbulkan lainnya, seperti programnya yaitu: desa tanggap covid dan juga jaring pengaman sosial serta adanya program BLT DD. Pemerintah mengupayakan untuk seluruh masyarakat atau calon KPM bantuan dipilih oleh pemerintah desa dengan menggunakan skala prioritas dari kriteria yang berlaku, dengan disetujuinya keputusan bersama ini oleh seluruh lapisan masyarakat maka dapat disimpulkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Dana Desa.

Jawaban selaras juga diberikan informan 06/SH yang menyatakan bahwa program dari pemerintah dan juga dana yang telah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, seperti salah satu programnya yaitu: desa tanggap covid dan juga jaring pengaman sosial serta adanya program BLT DD ini mbak. Pemerintah desa hanya mengikuti perintah dari pusat dan tidak ada hambatan dalam menyesuaikan dan didukung oleh keterbukaan masyarakat.

Hasil wawancara yang diterima peneliti mengungkapkan dalam realokasi dan refocusing anggaran dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 tidak ada kendala yang besar yang sampai merubah ketetapan, pemerintah melaksanakannya efektif dan semaksimal mungkin.

3. Perencanaan Program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya

Peneliti untuk mengetahui perencanaan program BLT DD dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sebanyak 7 informan dari pemerintah desa di kecamatan Pinang Raya. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa perencanaan program BLT DD melalui proses Musdes yang melibatkan berbagai pihak dan lapisan masyarakat untuk menentukan jumlah KPM penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. Lalu dalam pemilihan KPM BLT DD dengan adanya Musdesus (musyawarah desa khusus).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 04/KT (wawancara tanggal 10 Februari 2022) menjelaskan bahwa tahap perencanaan program BLT DD dimulai dengan pemerintah desa membuat anggaran BLT DD dan jumlah KPM yang akan menerima program bantuan dengan musyawarah desa. Setelah itu pemerintah desa mengusulkan nama-nama calon penerima (KPM) setelah dipilih melalui musdesus (musyawarah desa khusus) berdasarkan kriteria yang ditetapkan ditetapkan oleh PMK dan regulasi yang ada, lalu dikirimkan ke pusat untuk validitas KPM mengenai nomor KK dan NIK, sehingga pusat dapat verifikasi para KPM yang untuk selanjutnya RKPDes Tahap 1 turun ke rekening desa, termasuk jumlah yang sudah dianggarkan

pemerintah desa pada program BLT DD. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari, tahap II 40 % dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret, tahap III 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan.

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, disalurkan dengan ketentuan: melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu dan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati/Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya, begitu juga selanjutnya pada tahap II dan tahap III. Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan, dengan jumlah KPM yang direncanakan dan direkam pada bulan Januari 2021 yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Total KPM yang Direkam Bulan Januari

Desa	Jumlah
-------------	---------------

Air Sekamanak	27
Marga Bhakti	20
Bukit Makmur	30
Bukit Harapan	44
Gunung Payung	20
Sumber Mulya	28
Bumi Harjo	16
Tanjung Muara	60
Air Simpang	20
Air Sebayur	60

Sumber: Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya

Jumlah KPM program BLT DD di kecamatan Pinang Raya berbeda setiap desanya, jumlah ini sesuai dengan pagu anggaran dana desa dan juga kebijakan desa dalam pengelolaan dana desa. Berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah dana yang digunakan atau yang harus disalurkan untuk program BLT DD sudah ditentukan persentasenya dan begitu pula untuk tahun 2022. Namun untuk tahun 2021 pemerintah desa, menganggarkan sendiri dan juga sesuai dengan kebijakan serta alokasi anggarannya masing-masing.

4. Pelaksanaan Program BLT DD Kecamatan Pinang Raya

Peneliti untuk mengetahui pelaksanaan program BLT DD dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sebanyak 7 informan dari pemerintah desa di kecamatan Pinang Raya. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa pelaksanaan program dimulai dengan RT memilih nama-nama calon KPM sesuai dengan kriteria, lalu membawa nama-nama tersebut ke Musdesus yang dihadiri oleh seluruh RT setiap desa, RW, Kadun dan instansi terkait untuk pemerintah desa menentukan siapa saja yang paling termasuk dalam kriterianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 09/SG (wawancara tanggal 15 Februari 2022) menjelaskan bahwa mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-Dana Desa, Desa menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Diperjelas dengan jawaban informan 12/JS selaku Ketua RT, dijelaskan bahwa tidak ada hambatan dalam proses penentuan KPM, dengan hanya memilih kurang lebih 10 nama calon KPM yang tidak menerima bantuan apapun, jadi beliau mempertegas bahwa nama-nama tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Proses pendataan KPM dilakukan dengan Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas. Pelaksanaan program dimulai dengan kepala desa memberikan tugas kepada ketua RT, RW dan BPD untuk menentukan nama-nama calon penerima KPM dari tingkat RT, dikarenakan setiap RT hanya menaungi 30-40 kk maka dirasa mampu meng-*cover* dan mengetahui seluk beluk ekonomi masyarakatnya, nama-nama yang telah terpilih oleh RT selanjutnya dibawakan ke

perkumpulan RT yang dihadiri seluruh KK , RW dan perwakilan BPD, di perkumpulan ini RT menyebutkan nama-nama tersebut, dan membuka sesi diterima atau apakah ada masyarakat lain yang keberatan atau tidak. Setelah nama-nama tersebut disetujui, RT membawa nama tersebut ke Musdesus yang dihadiri oleh seluruh RT, RW, Kadun, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi lainnya

Proses Konsolidasi dan Verifikasi, hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh RT, RW dan Kadun kepada Kepala Desa. Pemerintah Desa memverifikasi kembali apakah nama-nama yang diusulkan ini sesuai dengan kriteria dan berhak menjadi KPM atau tidak dengan bantuan verifikasi data dari kasi kesejahteraan. Setelah nama-nama tersebut lolos dari tahap konsolidasi dan verifikasi maka tahap selanjutnya yaitu validasi KPM.

Selanjutnya dipertegas dalam penjelasan oleh informan 10/GA (wawancara tanggal 10 Februari 2022) yang menyatakan bahwa Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima, Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama BLT-Dana Desa. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang

strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Gambar 4.1 Proses Mudesus dengan Mengutamakan Protokol Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Sekretaris Desa

Setelah KPM sudah ditentukan dalam Musdesus selanjutnya pemerintah desa melaporkan ke pusat untuk selanjutnya pada dana masuk ke rekening desa, BLT DD segera dibagikan ke KPM. Pemberian BLT DD dilaksanakan dengan KPM datang langsung ke Kantor desa dengan membawa persyaratan berupa KK, KTP dan KPM diharuskan sudah vaksin. Pembagian BLT DD dengan mengutamakan protokol kesehatan. Bagi KPM yang tidak ada yang mewakili seperti mereka yang menderita sakit kronis, sakit

menahun atau yang lainnya, pemerintah desa datang sendiri ke rumah KPM untuk mengantarkan bantuan ini.

5. Pelaporan Program BLT DD Kecamatan Pinang Raya

Peneliti untuk mengetahui pelaporan program BLT DD dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sebanyak 7 informan dari pemerintah desa di kecamatan Pinang Raya. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa pelaporan program BLT DD dibuat setelah realisasi dana BLT DD. Pada nama-nama yang direalisasikan ini sesuai dengan nama-nama yang direncanakan dan terpilih dalam Musdesus. Pelaporan BLT DD dilaporkan pada Kecamatan dan juga Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 05/AD (wawancara tanggal 15 Februari 2022) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dalam musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya. Data Dana Desa ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Data Dana Desa Kecamatan Pinang Raya

Desa	Jumlah	Pagu	Dana Desa	Dana Desa	Dana Desa	Alokasi	BLT
------	--------	------	-----------	-----------	-----------	---------	-----

	Desa		Sudah Masuk RKP Desa Tahap 1	Sudah Masuk RKP Desa Tahap 2	Sudah Masuk RKP Desa Tahap 3	COVID-19 (Desa)	(Desa)
Air Sekamanak	1	837,738,000	335,095,200	335,095,200	167,547,600	1	1
Marga Bhakti	1	1,232,131,000	492,852,400	492,852,400	246,426,200	1	1
Bukit Makmur	1	1,243,036,000	497,214,400	497,214,400	248,607,200	1	1
Bukit Harapan	1	1,188,981,000	475,592,400	475,592,400	237,796,200	1	1
Gunung Payung	1	965,638,000	386,255,200	386,255,200	193,127,600	1	1
Sumber Mulya	1	832,343,000	332,937,200	332,937,200	166,468,600	1	1
Bumi Harjo	1	758,339,000	303,335,600	303,335,600	151,667,800	1	1
Air Sebayur	1	1,108,019,000	443,207,600	443,207,600	221,603,800	1	1
Air Simpang	1	807,500,000	323,000,000	323,000,000	161,500,000	1	1
Tanjung Muara	1	1,122,012,000	448,804,800	448,804,800	224,402,400	1	1

Sumber: sid.kemendes.go.id

Jumlah pagu anggaran yang diterima berbeda setiap desanya, jumlah yang diterima setiap desa diturunkan 3 tahap berdasarkan PMK yang berlaku yaitu Dana Desa Sudah Masuk RKP Desa Tahap 1 (40%), Tahap 2 (40%) dan Tahap 3 (20%). Jumlah yang masuk setiap tahap dibagikan setiap anggaran setiap program desa. Jumlah KPM yang direkan oleh seluruh Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Data KPM BLT DD Kecamatan Pinang Raya

Desa	Σ KPM Jan	Σ KPM Feb	Σ KPM Mar	Σ KPM Apr	Σ KPM Mei	Σ KPM Jun	Σ KPM Jul	Σ KPM Agu	Σ KPM Sep	Σ KPM Okt	Σ KPM Nov	Σ KPM Des	Σ Akumulasi KPM
Air Sekamanak	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	20	21	304
Marga Bhakti	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	236
Bukit Makmur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Bukit Harapan	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528
Gunung Payung	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Sumber Mulya	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
Bumi Harjo	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Air Sebayur	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Air Simpang	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Tanjung Muara	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Total KPM													3876

Sumber: sid.kemendes.go.id

Infoman 08/IR Sekretaris Desa Bumi harjo (dalam wawancara tanggal 10 Februari 2022) mengungkapkan bahwa jumlah KPM yang diajukan setiap desa berbeda-beda, dikarenakan tidak adanya peraturan atau regulasi 2021 yang mengatur berapa persen dari Dana Desa untuk program BLT DD namun setiap desa wajib menganggarkan program BLT DD dan apabila diketahui ada

desa yang tidak menganggarkan program ini maka akan mendapatkan sanksi dari negara, dimana Dana Desa merupakan Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.8 Bulan Realisasi BLT DD Per Bulan Kepada KPM

No	Desa	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Air Sekamanak	Maret	April	Mei	Juni	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des			
2	Marga Bhakti												
3	Bukit Makmur												
4	Bukit Harapan												
5	Gunung Payung												
6	Sumber Mulya												
7	Bumi Harjo												

Sumber: pemerintah desa Kecamatan Pinang Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 02/AS (tanggal 20 Februari 2022) menjelaskan bahwasannya realisasi bantuan ke KPM tidak rutin diberikan sebulan sekali, melainkan sesuai dengan dana yang diturunkan ke rekening desa. Hal ini dipertegas dengan jawaban informan 06/SG yang menyatakan bahwasannya tidak sedikitpun dana BLT DD diendapkan di rekening desa, setelah 1-2 hari penerimaan langsung direalisasikan ke KPM. Pembagian bantuan oleh pemerintah desa dibagikan setelah dana turun ke rekening desa, secara general pembagian setiap desa dilakukan pada bulan

yang sama, yaitu bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.

6. Pengukuran Efektivitas Program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

Pengukuran efektivitas yang digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya dengan menggunakan pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Mutiarin 2014) yaitu yang diantaranya: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh.

a. Keberhasilan Program

Peneliti memberikan pertanyaan kepada seluruh Informan, bagaimana Pemerintah Desa menilai apakah program BLT DD yang terlaksana ini sudah berhasil atau belum, pemerintah desa mengungkapkan bahwasannya program BLT DD 2021 yang terlaksana di desa-desa kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sudah berhasil (pengukuran keberhasilan program juga mengevaluasi efektivitas dalam pengukuran selanjutnya), seperti yang diungkapkan oleh informan 06/SH pemerintah Desa Sumber Mulya (wawancara 10 Februari 2022) yang menyatakan keberhasilan program BLT DD dengan dibuktikannya data KPM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, pemerintah desa cepat dalam realisasi dan pelaporannya, dan tidak ada masyarakat yang komplain dengan disahkannya daftar KPM ini, data-data yang dibutuhkan lengkap

dengan KK dan alamat KPM, tidak ada hambatan dalam proses penentuan KPM, Pemerintah Desa menjelaskan bahwasannya adanya bantuan ini digunakan oleh KPM untuk tambahan pemenuhan ekonomi, dan jelasnya syarat khusus dalam pengambilan bantuan BLT DD oleh KPM adalah dengan menunjukkan KK baik fotokopi maupun asli serta bukti sudah vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah.

Jawaban yang sama juga diberikan oleh informan 01/MH Pemerintah Desa Gunung Payung (wawancara 10 Februari 2022) yang menjelaskan bahwa program BLT DD sebagai salah satu program yang terlaksana pada tahun anggaran 2021 tidak ada kendala apapun dalam setiap proses pelaksanaannya, dimana hal ini menunjukkan bahwasannya program BLT DD berhasil, tidak ada masyarakat yang keberatan, daftar nama KPM dan KK lengkap, tidak ada hambatan khusus dalam penentuan KPM, seluruh lapisan masyarakat berikut serta dalam pengambilan keputusan dalam program ini, sebagian besar masyarakat menggunakan bantuan ini sebagai pemenuhan ekonomi dan syarat utama KPM dalam pengambilan diharuskan sudah vaksin.

Hasil evaluasi jawaban seluruh informan yang menyebutkan secara berulang, keberhasilan program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya tergolong berhasil. Jawaban informan yang didukung juga dengan bukti adanya jadwal pemberian, dokumentasi dan juga laporan realisasi yang sesuai dengan yang telah direncanakan maka kesesuaian hasil wawancara dalam pengukuran yang pertama dapat dikatakan berhasil dan efektif.

b. Keberhasilan Sasaran

Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan, baik Pemerintah Desa dan juga KPM untuk menilai dan menganalisis apakah sasaran atau KPM yang menerima program ini sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 10/GA Pemerintah Desa Bukit Harapan (wawancara 10 Februari 2022), Pemerintah berusaha dengan teliti dan cermat dalam penentuan KPM, meskipun masih keluhan atau komplain dari masyarakat namun pemerintah desa berupaya memberikan penjelasan bahwa masih ada KPM yang memenuhi kriteria yang berada dibawahnya, hingga pada masyarakat mengerti dan terima. Karena dari usulan dari RT yang telah dan bisa tahu menahu masyarakatnya, kami berusaha percaya dengan membandingkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan RT sebelumnya dalam musdesus, berpedoman juga pada data DTKS dan latar belakang ekonomi dan kesehatannya juga.

Jawaban ini selaras dengan pernyataan seluruh KPM yang mengungkapkan bahwa mereka belum menerima bantuan lain sebelumnya, pekerjaannya sebagai buruh tani, dan perekonomiannya yang terdampak pandemi (harga komoditas seperti karet dan sawit turun saat itu). Para KPM mengungkapkan merasa terbantu dengan bantuan ini dan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Jawaban yang sama juga didukung oleh informan 22/SO yang menyatakan bahwasannya pemilihan KPM dan sasarannya sudah baik dan

yang penerima tidak mampu, yang sebagian besar dari mereka yaitu orang tua (RT 04 Desa Bukit Makmur).

Berdasarkan evaluasi hasil wawancara dengan informan didukung juga dengan hasil dokumentasi laporan dari pemerintah desa yang menyatakan bahwa KPM penerima memiliki latar belakang yang sesuai dengan kriteria dan merupakan masyarakat dengan prioritas tertinggi setelah dilakukannya perbandingan dengan KPM lainnya, yaitu mereka miskin, belum terdaftar di DTKS, sakit menahun/kronis, terdaftar di DTKS tetapi belum menerima bantuan, mereka yang kehilangan mata pencaharian. Maka dari segi pengukuran keberhasilan sasaran dapat dikatakan efektif.

c. Kepuasan Terhadap Program

Peneliti untuk mengetahui kepuasan KPM terhadap program BLT DD, teknik wawancara peneliti lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan baik Pemerintah Desa dan juga KPM terkait dengan apakah KPM mendapat kepuasan atau puas dengan program BLT DD yang sudah dilaksanakan. Hasil wawancara dari pemerintah desa yang mengungkapkan bahwa mereka selalu mengadakan sosialisasi program pemerintah kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan secara langsung yang diadakan di balai desa atau dengan melalui perkumpulan mingguan serta sosialisasi dilakukan melalui ketua RT untuk menyampaikan kepada warganya masing-masing.

Jawaban selaras juga diberikan oleh informan 15/DW selaku KPM (wawancara 16 Februari 2022) dan juga merupakan salah satu jawaban yang mewakili jawaban berulang yang disampaikan informan, beliau menjelaskan bahwasannya sosialisasi selalu dilakukan oleh pemerintah desa atas setiap program dari Dana Desa, masyarakat selalu mengetahui bentuk-bentuk dan juga realisasi program secara nyata. Sosialisasi juga dilakukan kembali oleh ketua RT dalam acara perkumpulan RT dimana juga menjelaskan terkait program BLT DD, maka dari itu masyarakat tidak tertinggal info apapun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. KPM juga mengungkapkan beliau tidak keberatan dengan realisasi bantuan yang tidak rutin satu bulannya, melainkan sesuai dengan diturunkannya dana ke rekening desa, dengan program ini juga KPM sudah cukup merasa terbantu dan puas dengan adanya program ini.

Evaluasi terhadap pengukuran efektivitas kepuasan terhadap program BLT DD maka dapat disimpulkan pengukuran ini efektif.

d. Kesesuaian Input dan Output

Penilaian ukuran efektivitas yang keempat yaitu kesesuaian input dan output, penilaian ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti hingga pada peneliti memperoleh jawaban yang berulang dari informan. Salah satu jawaban yang mewakili seluruh jawaban dari informan, informan 16/T sebagai KPM (wawancara 16 Februari 2022) mengatakan bahwa realisasi bantuan diberikan tidak setiap bulan, tapi jumlahnya lengkap diterima 12 bulan tiga ratus ribu per

bulannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan KPM adalah IRT kadang juga membantu suami di kebun yang bekerja sebagai petani.

Penjelasan lebih lengkap juga disampaikan oleh informan 10/GA Pemerintah Desa Bukit Harapan (wawancara 10 Februari 2022) yang menyatakan bahwa jumlah dana BLT DD yang direncanakan/dianggarkan beserta data KPM sesuai dengan yang terealisasikan, hal ini terdapat pada (tabel 4.7) dan realisasi pada dokumentasi (lampiran 3 KPM BLT DD).

Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil wawancara dengan informan maka hasil evaluasi pengukuran pada tingkat input dan output BLT DD dapat dikatakan efektif.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Peneliti untuk mengetahui kepuasan KPM terhadap program BLT DD, teknik wawancara peneliti lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan baik Pemerintah Desa dan juga KPM, terkait dengan apakah KPM mendapat kepuasan dalam pelaksanaan program, digunakan untuk apa bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 17/HA sebagai KPM (wawancara 20 Februari 2022) jawaban yang mewakili seluruh jawaban serupa dari KPM, informan mengungkapkan bahwasannya mereka puas dengan program ini dari sosialisasi dan juga realisasi bantuan, jumlah ini sangat membantu KPM dan bantuan ini dirasa cukup untuk

tambah pemenuhan kebutuhan KPM tidak keberatan bahwasannya realisasi bantuan tidak rutin setiap bulannya, KPM mengungkapkan bahwa pekerjaannya sebagai buruh tani.

Program BLT-DD yang dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Dengan bantuan tersebut, kegiatan ekonomi warga dapat terus berjalan, terutama bagi warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19. Pemerintah fokus mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk pemulihan ekonomi di desa, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas pencapaian tujuan menyeluruh sudah efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi dan kaitannya dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pemerintah Desa

Berdasarkan temuan penelitian, jawaban general terkait pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pinang Raya, jawaban informan mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Berdasarkan pada regulasi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maka pihak desa harus mengikuti regulasi tersebut. Meskipun terdapat kendala pemerintah desa berupaya menjalankan pelayanan dan pengelolaan, pelaksanaan setiap program dana desa di masa pandemi berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat tahun anggaran di masa pandemi berjalan sesuai regulasi.

Dana Desa pada saat sebelum pandemi yang sebagian besar dananya digunakan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik (Permendesa Nomor 11 Tahun 2019) dan di masa pandemi dialihkan sebagian besar untuk pemulihan ekonomi nasional, adaptasi kebiasaan baru desa dan program prioritas nasional yaitu mengatasi penyebaran dan penyelesaian dampak dari pandemi Covid-19 (Permendesa Nomor 13 Tahun 2020), yang mana melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebagai salah satu upaya mengatasi dampak dan penyebaran Covid-19. Dana Desa TA 2021, dengan ketentuan: dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) antara lain: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai prioritas penggunaan Dana Desa 2021, paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman Covid-19 dan satuan tugas desa aman Covid-19.

Adanya realokasi dan refocusing anggaran sebagai akibat dari adanya pandemi membuat pemerintah melakukan penyesuaian dan tanggap yang sangat cepat. Segala kegiatan yang dilakukan diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang ada, walaupun begitu seluruh program Pemerintah Desa yang telah terencana pada tahun 2020 dan 2021 berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Dana Desa 2021 yaitu meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas, dengan

mendukung pemulihan perekonomian desa dalam penguatan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai.

4.2.2 Perencanaan program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya

Berdasarkan pada hasil wawancara, proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan kriteria, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan yang dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa merencanakan jumlah KPM yang akan menerima bantuan ini berapa KK beserta jumlah anggarannya. Kami juga dalam nentuin jumlah ini ya musyawarah sama seluruh perangkat yang ada. Bulan januari kami serahkan nama-nama calon penerima (KPM) beserta NIK atau KK, dan alamatnya. Data KPM diusulkan ke pusat, lalu *approved* sehingga masuk anggaran 2021.

Tidak ada kendala dalam perencanaan BLT DD. Lalu di Tahap I dana dari pusat turun sesuai dengan yang dianggarkan dan langsung dibagikan ke KPM. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan dengan meningkatkan perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pernyataan informan menyatakan bahwa perencanaan program BLT DD berjalan dengan efektif yang ditandai dengan sesuainya jumlah KPM yang dianggarkan dengan jumlah KPM yang direalisasikan.

4.2.3 Pelaksanaan Program BLT DD

Setelah selesai dalam penentuan KPM di tahap perencanaan dalam Musdes dan Musedesus yang di dalamnya terdapat proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan juga instansi terkait, setelah diberitakan KPM maka selanjutnya melaporkannya ke pemerintah sebagai anggaran tahun 2021, setelah dana masuk ke rekening desa, pihak pemerintah desa selang 1-2 hari mengabari KPM untuk segera mengambil bantuan ke kantor desa, dan untuk KPM tunggal yang tidak bisa menghadiri dan tidak ada yang mewakilkan maka pemerintah desa akan mengantarkan sendiri bantuan tersebut.

Berdasarkan pada temuan penelitian, peneliti menilai bahwasannya pelaksanaan program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan setiap tahap-tahap pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan dan regulasi yang ada.

4.3.4 Pelaporan Program BLT DD

Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dalam pelaporan program disebutkan bahwa tidak ada kendala apapun dan pelaporan selalu dilakukan tepat waktu setelah pemerintah desa menyalurkan bantuan ke KPM lalu didokumentasikan dan setelah itu laporan dikirim sebagai realisasi BLT DD, laporan dikirim sebagai upaya pertanggungjawaban pemerintah desa bahwa telah melaksanakan sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Dalam rangka pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan

pendapatan dan belanja atas Dana Desa berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Pelaporan dilakukan untuk memenuhi syarat dicairkannya dana bantuan di bulan selanjutnya.

4.3.5 Pengukuran Efektivitas Program BLT DD

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program merupakan ukuran yang penting dalam menilai sebuah kebijakan pencapaian dari sebuah kebijakan dari sebuah instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena sebuah kebijakan pemerintah bisa dinilai mencapai target apabila program tersebut sudah berhasil dilaksanakan.

Penilaian keberhasilan program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan memberikan hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah atau kendala yang dihadapi dalam penentuan KPM, yang ditandai dengan disetujuinya hasil musyawarah yang dihadiri seluruh lapisan desa, dan tidak adanya masyarakat yang komplain setelah disahkannya daftar ini. Jawaban sama beruntun dilontarkan oleh pemerintah desa, bahwa masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten memberikan *feedback* baik dengan adanya program ini, dan KPM yang terbantu dengan adanya bantuan ini. Sebagian besar KPM menggunakan uang dari bantuan ini untuk tambah pemenuhan ekonomi keluarga.

Pelaporan program BLT DD di seluruh desa Kecamatan Pinang Raya, informan menyatakan bahwa pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa

setelah BLT DD sudah direalisasikan kepada KPM, dalam pelaporan juga tidak ada kendala khusus, setelah dana BLT DD cair ke rekening desa, dihari berikutnya pemerintah membuat laporan program yang dilaporkan ke Kecamatan Pinang Raya dan Kabupaten melalui Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

1. Tidak ada kendala dalam proses perencanaan program BLT DD;
2. Tidak ada kendala dalam pemilihan KPM;
3. Tidak adanya masyarakat yang komplain dengan berlangsungnya program;
4. KPM merasa puas dan terbantu dengan bantuan;
5. Pemerintah berupaya tepat waktu direalisasikan dan dana tidak dibiarkan mengendap di desa atau dialokasikan untuk hal lainnya.

Hasil efektivitas ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Sofi (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa.

2. Keberhasilan Sasaran

Dalam pelaksanaan program BLT-DD, menentukan target sasaran adalah salah satu faktor penting yang harus di cermati dengan seksama. Kriteria KPM dijadikan dasar agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Untuk mengetahui apakah dalam penentuan KPM di Kecamatan Pinang Raya telah sesuai dengan kriteria. Urgensi dari hasil wawancara tersebut adalah pernyataan dari 7 Kepala Desa yang mengakui bahwa penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme

yang berlaku yakni sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara. Penentuan KPM dilakukan dengan cara Musdesus yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh desa serta seluruh ketua RT yang bersama-sama merundingkan KPM yang layak mendapatkan BLT-DD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kriteria penerima sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 berikut beberapa karakteristik yang digunakan sebagai standar untuk menentukan penerima BLT-DD yaitu: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya, serta memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun (Kementrian Desa PDTT, 2020b). Pemerintah Desa menyatakan bahwa sasaran sudah sesuai dengan kriteria yang ada atau sudah tepat sasaran, dimana kriteria penerima program BLT DD yaitu: keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja, Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Hasil penelitian mengenai ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya telah mengikuti mekanisme pendataan yang

ditentukan, proses pemilihan calon penerima BLT-DD Pemerintah Desa transparan kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran dari program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya sudah tepat sasaran dan efektif.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan masyarakat atau KPM dengan adanya program BLT DD, ditunjukkan dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa sosialisasi selalu diadakan oleh pemerintah desa atas program pemerintah desa termasuk program BLT DD, sosialisasi dilakukan di balai desa dengan dihadiri seluruh aparat pemerintah desa serta masyarakat. Selain itu, sosialisasi kadang juga dilakukan pada saat ada perkumpulan, seperti arisan, posyandu dan kegiatan masyarakat lainnya.

Jumlah yang diberikan oleh pemerintah desa dan yang diterima oleh KPM berjumlah 300 ribu per bulan dalam satu tahun, jawaban yang sama juga diberikan oleh KPM bahwa mereka menerima bantuan BLT DD 300 ribu per bulan dalam satu tahun. Jumlah ini disalurkan oleh pemerintah secara bertahap tidak rutin satu bulannya, tetapi pasti genap direalisasikannya satu tahun. Jumlah ini cukup membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan sehingga dapat dikatakan bahwa KPM puas dengan adanya program ini.

4. Kesesuaian Input dan Output

Peneliti menilai dengan adanya hasil wawancara dengan informan, di bulan pertama pada awal tahun 2021, setelah ditetapkannya hasil musdesus oleh pemerintah desa terkait dengan nama-nama KPM BLT DD, selanjutnya pemerintah mengirim nama tersebut dan menganggarkan program BLT DD

(tabel 4.7). Lalu setelah dibagikannya dana yang sudah diturunkan ke rekening desa langsung direalisasikan ke KPM sesuai dengan nama-nama yang telah direncanakan dan dianggarkan (lampiran 4), Pemerintah Desa juga mendapatkan respon baik dari KPM. Selanjutnya pemerintah desa melaporkan program di kecamatan dan juga kabupaten sebagai syarat sudah terealisasinya program dan juga sebagai syarat diturunkannya dana BLT DD untuk bulan selanjutnya.

Efektifnya kesesuaian input dan output dapat diartikan bahwa pelaksanaan program BLT DD oleh Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya berjalan dengan efektif.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai efektivitas program BLT-DD yang ada di Kecamatan Pinang Raya, disimpulkan bahwa program BLT-DD yang dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Dengan bantuan tersebut, perputaran uang atau kegiatan ekonomi warga dapat terus berjalan, terutama bagi warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19. Pemerintah fokus mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk pemulihan ekonomi di desa. BLT Desa merupakan salah satu program dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara kepada KPM, sebagian besar uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan dapur dan

sebagian kecilnya dibelanjakan untuk kepentingan lain. Esensi dari hasil wawancara di atas adalah uang BLT-DD yang didapatkan digunakan untuk membeli keperluan dapur seperti untuk membeli beras, sayur-sayuran, lauk-pauk dan kebutuhan yang lain. Berdasarkan kesesuaian antara jumlah KPM yang dianggarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya sudah tercapai secara menyeluruh, jawaban masyarakat yang merespon baik terkait dengan kepuasan dan juga terbantu dengan adanya program BLT DD 2021. Terwujudnya harapan dari program ini yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional di desa, terutama terwujud di desa-desa kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

BLT-DD mempunyai beberapa tujuan, yaitu membantu masyarakat miskin terdampak pandemi covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. Dengan tercapainya tujuan suatu program sebagaimana yang diharapkan pemerintah Indonesia, maka program BLT DD 2021 Kecamatan Pinang Raya sudah bisa dikatakan berhasil dan efektif.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka pencapaian tujuan menyeluruh program BLT DD berperan positif dalam penurunan angka kemiskinan kabupaten Bengkulu Utara dimana data mengungkapkan bahwa kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 kemiskinan 11,65% namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen yang menjadi 11,67%, yang

kemungkinan meningkat akibat bencana Covid-19, dan di tahun 2021 tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,61% (BPS Bengkulu Utara 2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Program BLT DD di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)” dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi perbedaan alokasi dan fokus anggaran, dimana sebelum pandemi Dana Desa difokuskan pada pembangunan fisik desa, pemberdayaan masyarakat dan program lainnya. berbeda pada saat pandemi yang difokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19 yang salah satu programnya yaitu Program BLT DD. Program BLT DD di tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program di Kecamatan Pinang Raya sudah dapat dikatakan efektif dengan tidak adanya kendala dalam ketiga tahap tersebut, dan penyesuaian selalu mengikuti peraturan dan regulasi yang ada. Keberhasilan lainnya juga dapat dilihat dari efektifnya seluruh hasil pengukuran pada keberhasilan program di pemerintahan desa Kecamatan Pinang Raya dibuktikan dengan:

1. Tidak ada masalah dalam penentuan KPM;
2. Masyarakat di seluruh desa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten memberikan *feedback* baik dengan adanya program ini;
3. KPM yang terbantu dengan adanya bantuan ini Keberhasilan sasaran terpenuhi dengan seluruh KPM yang termasuk dalam kriteria yang ada;

4. Kepuasan terhadap program ditunjukkan bahwa jumlah bantuan cukup membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa KPM puas dengan adanya program ini;
5. KPM yang direncanakan sama dengan yang direalisasikan;
6. Terpenuhinya pengukuran efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh memuat hasil program ini membantu perekonomian warga desa, yang dibuktikan dengan arah positif yaitu penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya program BLT DD di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu program yang telah terlaksana pada pengelolaan dana desa 2021, dimana dengan berhasil dan efektifnya program ini memberikan dampak positif dalam pelaksanaan program-program pemerintah lainnya, keberhasilan ini dapat diadopsi pelaksanaannya dan dapat meningkatkan kinerja keberhasilan SDM Desa.
2. Bagi masyarakat dengan adanya program BLT DD ini dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa, oleh karena itu masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat transparansi kepada masyarakat

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Seluruh Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
 - a. Dapat menyinergikan kembali antara perangkat desa dengan masyarakat terkait informasi tentang program pemerintah dari pengelolaan dana desa.
 - b. Pemerintah Desa di Kecamatan Pinang Raya sebaiknya melakukan pemutakhiran data penduduk miskin untuk membantu mempermudah dalam menentukan penerima bantuan sosial selanjutnya.
 - c. Dapat memberikan informasi tentang pengelolaan anggaran dana desa kepada masyarakat secara rutin.
 - d. Dalam upaya mengurangi kecurigaan terhadap pemerintah desa sebaiknya dalam hal program pendampingan seperti ini ada transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat. Transparansi dapat dilakukan secara offline atau online.
 - e. Pemerintah desa perlu memperbaharui penyedia layanannya, seperti membuat website desa untuk mempermudah dalam mengakses informasi di desa sehingga memberikan informasi tentang rencana kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan.

2. Bagi Masyarakat, adanya penelitian ini tentang pengelolaan dana desa pada program BLT DD, masyarakat diharapkan:
 - a. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait program kerja pemerintah desa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - b. Masyarakat dapat mengontrol dan mengevaluasi bersama terkait program serta kinerja pemerintah desa.
 - c. Masyarakat dapat memberikan dukungan pemerintahan desa tentang pengelolaan dana desa, baik melalui materi ataupun dengan memberikan informasi-informasi untuk membantu pengelolaan dana desa.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, peneliti dapat memperdalam penelitian tentang pengelolaan dana desa pada program BLT DD ini:
 - a. Dapat meneliti lebih lanjut tentang efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana desa program BLT DD dengan membandingkan kecamatan yang lain.
 - b. Dapat mempertimbangkan indikator lain misalnya dengan menambahkan peningkatan kualitas kerja pemerintah setelah pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam program BLT DD, untuk mengetahui timbal baliknya dan mengetahui kualitas kerja pemerintahan desa itu sendiri.
 - c. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif, untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dengan ketetapan

sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program di desa-desa kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari masih adanya kekurangan dalam keterbatasan diluar jangkauan peneliti, yaitu ketidakjujuran informan dan ketidaktelitian peneliti terhadap informan dalam memberikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. S. (2010). Evaluasi Dampak Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Tentang Evaluasi Dampak Program BLT Terhadap Rumah Tangga Sasaran). *Universitas Brawijaya*.
- Amin Widjaja Tunggal. (1993). *Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anjarwati, Novita, dan Soebiantoro. (2021). The Evaluation of Covid-19 Blt Distribution in Blitar Regency. *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*, 6(2), 39-48.
- Anna, F. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2020*. Skripsi tidak diterbitkan. Tegal: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkulu Utara*. Bengkulu Utara: Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1).
- Fajri, Rahmi, dan Endah, S. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Gibson, dan James, L. (2011). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5 Cetakan ke-3*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. (1997). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hendi, S. P. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–19.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ihyaul Ulum, M. D. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Kantirina, R. (2021). Effectiveness of Cash Assistance (BLT) for Communities Affected by The Pandemic Covid-19: Case Study in Sirnajaya Village, Cibadak Sub-District, Sukabumi District. *LEGAL BRIEF*, 11(1), 320-330.
- Kemenkeu. (2021a). Sosialisasi Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, dimuat dalam: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/sosialisasi-refocusing-dan-realokasibelanja-kementerianlembaga-ta-2021>.
- Lubis dan Husain. (2007). *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamonto, Thelma, dan Gloria. (2021). Policy Implementation Direct Cash Assistance Program in Corona Virus Disease (COVID-19) in Tondegesean Village Kawangkoan Sub District. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1): 126-138.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekosiana.
- Maun, Carly. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politik*, 9(2), 1–16.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samita, Cahyo, Ertien Rining Nawangsari. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu Cahyo Sasmito Ertien Rining Nawangsari. *JPSI (Journal of Public Sector Innovation)*, 3(2), 68–74.
- Saputra, Sugeng, dan Nour. (2020). The Effectiveness of The Village Fund Direct Cash Assistance Program for Communities Affected by Covid-19 in Batu Gajah Village, Rupit District, Musi Rawas Utara Regency. *International Journal of Policy and Public Administration*, 1 (2), 1-7.
- Sasongko, Ummu, dan Ikin. (2021). Village Fund Policy Implementation Strategy in Sumedang Regency. *International Journal of Science and Society*, 3(2), 191-201.

- Siagian, H. (1997). *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Steers, dan Richard. (2008). Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); edisi pertama). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Supriyono, R.A. (2000). *Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease (covid-19).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang penggunaan anggaran transfer e daerah dan dana tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019

Surat Menteri Desa PDDT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDDT Nomor 06 Tahun 2020.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.

Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Instruksi menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu BLT DD yang menyelenggarakan musyawarah desa khusus

Instruksi menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT DD.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PINANG RAYA

Jalan Poros Desa Sumber Mulya D7 Kode Pos. 38361
E-mail : pinangraya2015@gmail.com <https://pinangraya2015.blogspot.com>

SURAT IZIN PENELITIAN MAHASISWA

Nomor : 070/ 24 /REK/ K5-PR/2022

- I. Dasar : Rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 353/UN30.10/LT/2022 tentang Izin Penelitian Mahasiswa.

Sehubungan dasar diatas maka Camat Pinang Raya memberikan surat izin penelitian kepada :

Nama/NPM : Yuli Mulyani / C1C018130
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Program BLT DD di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)
Daerah Penelitian : Desa di Kecamatan Pinang Raya
Waktu Penelitian : 2 (Dua) Bulan

- II. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas Penelitian dimaksud.

III. Dengan Ketentuan Bahwa

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada instansi terkait (Desa di Kecamatan Pinang Raya) yang akan dijadikan penelitian
2. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Selesai melakukan penelitian agar menyampaikan laporan hasil penelitian pada Camat Pinang Raya

Demikian rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pinang Raya
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

Camat Pinang Raya



M. IRFAN, S.Sos

NIP. 19700718 199303 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telp (0736) 21170, 21844 & Fax 0736-21396
Laman: <http://feb.unib.ac.id> E-mail: feb@unib.ac.id

Nomor : 757 / UN30.10/LT/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Januari 2022

Yth. Camat Kecamatan Pinang Raya
Kab. Bengkulu Utara

Sehubungan dengan tugas Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

NAMA : Yuli Mulyani
NIM : C1C018130
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Program BLI – Dddi Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*
Tempat Penelitian : Desa di Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA
NIP 197103131996011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A

Telp (0736) 21170, 21844 & Fax 0736-21396

Laman: <http://feb.unib.ac.id> E-mail: feb@unib.ac.id

Nomor : 353 / UN30.10/LT/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Januari 2022

Yth. 1. Kepala Desa Gunung Payung,
2. Kepala Desa Tanjung Muara,
3. Kepala Desa Sumber Mulya,
4. Kepala Desa Bumi Harjo,
5. Kepala Desa Bukit Harapan,
Kecamatan Pinang Raya

Sehubungan dengan tugas Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

NAMA : Yuli Mulyani
NIM : C1C018130
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Efektivitas Penegelolaan Alokasi Dana Desa pada Program BLI – Ddi Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA
NIP 197403131996011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan WR. Supratnan Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telp (0736) 21170, 21844 & Fax 0736-21396
Laman: <http://feb.unib.ac.id> E-mail: feb@unib.ac.id

Nomor : 757 / UN30.10/LT/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Januari 2022

Yth. 1. Kepala Desa Air Simpang,
2. Kepala Desa Air Sebayur,
3. Kepala Desa Air Sekamanak,
4. Kepala Desa Marga Bakti,
5. Kepala Desa Bukit Makmur,
Kecamatan Pinang Raya

Sehubungan dengan tugas Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

NAMA : Yuli Mulyani
NIM : C1C018130
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Efektivitas Penegelolaan Alokasi Dana Desa pada Program BLI – Ddi Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Data-data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA
NIP 197103131996011001

Lampiran 2

Tabel Hasil Observasi Penelitian

Tempat : Desa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

Waktu : 8 -10 Februari 08.30-15.00

No	Aspek yang diamati	Komentar
1	Kondisi Fisik Kantor Desa di Kecamatan Pinang Raya	Kondisi fisik kantor desa memiliki status kelayakan yang baik, dengan lengkapnya fasilitas desa dan didukungnya dengan SDM yang cukup memadai sehingga pemerintah desa mampu menunjang keberhasilan pengelolaan, pelayanan dan aktivitas desa lainnya
2	Fasilitas Kantor Desa	Lengkap, memadai dan berfungsi dengan baik
3	Pengetahuan perangkat desa dan masyarakat mengenai Pengelolaan Dana Desa BLT DD	Seluruh perangkat desa mengetahui terkait seluruh proses program BLT-DD, pengetahuan ini yang diindikasikan adanya keberhasilan program

Pertanyaan Wawancara

No	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1	Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19		<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah ada perbedaan mengenai pengelolaan DD sebelum dan pada saat pandemi ? 2. jika ada, apakah ada kendala dalam pengelolaan DD ? 3. bagaimana antisipasi kendala yang dilakukan pemerintah desa ?
2	Realokasi dan Refocusing Dana Desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. pandemi yang mengakibatkan perubahan besar perekonomian nasional, bagaimana pemerintah berusaha menyesuaikan realokasi dan refocusing anggaran sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan regulasi yang ada ? 2. dengan ini juga pemerintah membantu masyarakat desa dengan adanya beberapa bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, baik ekonominya ataupun individu yang terinfeksi. Bagaimana cara pemerintah desa membagi kepada masyarakat, dikarenakan seluruh lapisan masyarakat yang merasa terdampak pandemi ini ?
3	Perencanaan Program BLT DD		<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana cara desa dalam proses perencanaan program BLT DD? Dan apakah ada kendala ? 2. Apakah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi mengenai program BLT kepada masyarakat?
4	Pelaksanaan Program BLT DD		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara penentuan KPM oleh pemerintah desa ? dari tahap pengumpulan data, konsolidasi dan verifikasi dan proses validasi dan penetapan hasil pendataan ? 2. Apakah pemerintah desa membentuk gugus tugas atau petugas BLT DD untuk mendata KPM ? 3. Apakah ada hambatan khusus dalam proses penentuan dan perencanaan KPM ? 4. apakah ada sosialisasi program BLT DD ke masyarakat ? 5. bagaimana anda menilai pelaksanaan BLT DD ? (pertanyaan kepada masyarakat) 6. apakah menurut anda KPM sudah tepat sasaran ?(pertanyaan kepada masyarakat)
5	Pelaporan Program BLT DD		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana urutan pelaporan program ? 2. Adakah kendala dalam pelaporan ? 3. Kemana saja Laporan Program BLT DD dikirimkan ?
6	Pengukuran efektivitas	Keberhasilan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana cara pemerintah desa menilai bahwa program BLT DD yang telah terlaksana sudah berhasil atau belum? 3. Bagaimana tanggapan pemerintah desa, jika ada masyarakat yang komplain karena tidak termasuk penerima program BLT DD ini padahal termasuk dalam kriterianya? 4. Apakah dalam penentuan penerima BLT DD terdapat daftar penerima beserta alamat KPM BLT DD ? dan apakah saya boleh mendapatkannya ? (Dokumentasi) 6. Apakah jumlah uang yang diberikan sudah sesuai dengan yang diterima? 7. Apakah pemerintah desa juga tahu, untuk apa bantuan ini digunakan oleh KPM ?

			8. Adakah syarat khusus kepada KPM dalam pengambilan bantuan ini ?
		keberhasilan sasaran	1. Apakah target dan sasaran program BLT DD sudah sesuai dengan kriteria yang ada atau sudah tepat sasaran, bagaimana pembuktiannya? 2. Apa langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengantisipasi salah sasaran penerima ?
		kepuasan terhadap program	1. selain merasa terbantu apakah dengan adanya program ini, anda merasa puas ? 2. Dikarenakan pemberian dana bantuan ini tidak rutin setiap bulannya, apakah anda sebagai KPM merasa keberatan ?
		tingkat input dan output	1. Apakah waktu pelaksanaan atau pemberian bantuan program BLT sudah berjalan sesuai setiap bulannya ? 2. Selanjutnya, bulan berapakah BLT DD ini dananya turun ke kas desa dan dibagikan ke KPM ?
		pencapaian tujuan menyeluruh	1. Apakah anda sebagai KPM merasa terbantu dengan adanya program ini? Dan apakah anda menerima bantuan lain selain bantuan ini ? 2. Apakah dengan jumlah ini dapat membantu ekonomi keluarga, atau boleh saya tau digunakan untuk apa bantuan ini. Dan maaf sebelumnya, boleh saya tau apa pekerjaan anda?

REDUKSI DATA

No	Pertanyaan Penelitian	Informan	Pengumpulan Data	
			Data Wawancara	Reduksi Data
1	apakah ada perbedaan mengenai pengelolaan DD sebelum dan pada saat pandemi ?	SH	<i>kalau perbedaan pasti ada, kami kan pemerintahan terbawah dari susunan pusat, tinggal ngikutin arahan dari atas dan juga peraturan dan undang-undang yang berlaku. Apalagi pandemi ini kan bisa dibilang dadakan ya, penyesuaian sana-sini, masyarakat juga panik jadi pemerintah desa diharuskan tanggap dan gerak cepat</i>	Terdapat perbedaan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Berdasarkan pada regulasi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maka pihak desa harus mengikuti regulasi tersebut. Meskipun terdapat kendala pemerintah desa berupaya menjalankan pelayanan dan pengelolaan namun pelaksanaan setiap program dana desa di masa pandemi berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat tahun anggaran di masa pandemi berjalan dengan baik. Dana Desa pada saat sebelum pandemi yang sebagian besar dananya digunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat dan di masa pandemi dialihkan untuk mengatasi penyebaran dan penyelesaian dampak dari pandemi Covid-19.
		MH	<i>banyak mbak perbedaannya. Secara dapat dibilang dadakan pemerintah mengoordinasikan mengenai pelaksanaan yang dianggap perubahan dadakan. Jadi kami gelagapan. Ya, kami juga berusaha buat dan laksanakan pelan-pelan dan setelah hampir 2 tahun ini berjalan sesuai dengan harapan. Yang penting nurut dan laksanakan apa yang diperintahkan ya mbak</i>	
		GA	<i>ada, selain di pengelolaannya berbeda sebelumnya dari yang dianggarkan awal tahun, jadi kami harus nyesuain lagi di bulan ketiga tahun 2020 kemarin. Semua yang sudah dibilang sudah direncanakan dengan baik tapi harus dialihkan ke sektor penanganan dampak pandemi</i>	
		AS	<i>ada mbak, yang awalnya kami pemerintah desa sudah merencanakan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan di pertengahan maret kami harus mengalokasikannya ke program yang mengarah pada</i>	

			<i>penanganan pandemi Covid-19. Juga perubahan dadakan dengan perencanaan yang sebelumnya belum ada persiapan beberapa ada yang membebani pemerintah desa. Namun, dengan kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat, tahun anggaran 2020 berjalan dengan baik.</i>	
		HA	<i>Iya pasti ada</i>	
		KT	<i>perbedaan ada mbak. Dalam program dan pelaksanaannya. Kalo dalam tahun anggaran sebelumnya yaitu 2019, DD itu sebagian besar untuk pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat, namun dalam pertengahan tahun 2020 dan tahun 2021 pengelolaan dana desa terfokuskan untuk mengatasi penyebaran dan dampak dari pandemi covid-19</i>	
		AD	<i>ada</i>	
2	jika ada, apakah ada kendala dalam pengelolaan DD ?	SH	<i>hambatan pengelolaan saya rasa dibagian melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan program. Jadikan yang awalnya ada sosialisasi DD ke masyarakat jadi sosialisasi ke individu atau dibagikan lewat media sosial yang dianggap lebih efektif</i>	Kendala atau hambatan dalam pengelolaan DD di masa pandemi yaitu adanya batasan ruang gerak (social distancing), sosialisasi yang awalnya pertemuan langsung harus digantikan dengan media sosial, dalam penggunaan media sosial ini terdapat kendala baru misalnya mati lampu yang hingga 1-2 hari kedepan, keterbatasan sinyal dan tidak semua masyarakat mempunyai handphone. Kendala selanjutnya yaitu adanya libur karena PSBB yang tidak memungkinkan untuk melakukan perkumpulan. Banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi ini sangat menyulitkan pemerintah dalam menyeleksi
		MH	<i>pas pertama bukan mbak dadakan, jadi kami harus patuh sama social distancing, ini yang paling susah mbak, apalagi kan sempet ada libur itu, tapi semua berjalan dengan baik kok mbak, terarah dan terukur juga. Kendalanya Cuma yang awalnya sosialisasi dilaksanakan langsung jadi via wa</i>	
		GA	<i>kalo kendalanya banyak mbak. Seperti adanya libur</i>	

			<i>kemarin, terus sosialisasi yang harus mematuhi protokol kesehatan, juga macam-macam hal yang harus dilakukan secara virtual. Ya dapat dibilang dari penganggaran sampai pelaksanaan ke masyarakat terdapat kendala mbak.</i>	calon penerima bantuan.
		HA	<i>pengelolaan DD yang terkesan mengalami perubahan dadakan atas tahun anggaran terutama tahun 2020. Jadi sesuai dengan anjuran dan arahan pemerintah pusat kami melakukan perubahan ulang yang mengarah pada realokasi dan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak dari pandemi covid-19.</i>	
		KT	<i>kendalanya ya penyesuaian keadaan, virus ini kan bukan main ya mba ganasnya, dari yang awalnya gejala demam biasa setelah di tes Covid, nah penyebarannya pun termasuk mudah, jadi kami juga bingung awalnya mau gimana pelaksanaannya, dari mulai social distancing dan juga penerapan protokol kesehatan</i>	
		AD	<i>pertama, kami harus menyesuaikan ulang setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 khususnya dan kalau tahun 2021 kan sudah tahu sebelumnya jadi perencanaan anggaran lebih matang. Kedua, pandemi sangat membatasi ruang gerak masyarakat, selanjutnya banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi ini sangat menyulitkan pemerintah dalam menyeleksi calon penerima bantuan</i>	
3	bagaimana antisipasi kendala	SH	<i>ya itu tadi mbak, penyesuaian. Tapi selama pandemi ini pemerintah desa sudah mengerahkan yang terbaik dan juga realisasi DD tepat dan cepat tanpa kendala. Apalagi</i>	Untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi nantinya Pemerintah desa melakukan penyesuaian. Segala yang sudah terencana di tahun anggaran pada

yang dilakukan pemerintah desa ?		<i>kan DD ini fokusnya ke menangani dampak pandemi</i>	masa pandemi dan mengurangi dalam pembangunan fisik daerah. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan koordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasannya Semua program yang sudah direncanakan oleh pusat akan terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat dalam musyawarah. Pemerintah desa berupaya menjalankan semaksimal mungkin dan tanggap pada masalah atau kendala yang nantinya akan dihadapi
	MH	<i>pertama kami juga memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan juga memberitahukan kalau ada pengalihan sementara dari dana desa yang dulu untuk pembangunan desa sekarang harus ditekan dan dialihkan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Selama masyarakat mempercayai kami, kami telah berusaha sebaik itu.</i>	
	GA	<i>nah, ini yang paling penting mbak koordinasi. Mengambil hati masyarakat dengan memberikan pengertian kalau memang ini semua terkendala pandemi. Mohon kesabarannya jika di kelanjutannya akan ada kendala lain. Semua program yang sudah di rencanakan oleh pusat akan terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat</i>	
	AS	<i>karena persiapan yang mendadak ini. Kami berusaha dengan baik dalam memilih program yang terlaksana. Lebih ke banyak musyawarah bersama saja sih mbak.</i>	
	HA	<i>kami melakukan dengan penyesuaian mbak, walaupun dengan tiba-tiba kami langsung melakukan tanggap mengenai pengelolaan ini. Walaupun dengan protokol kesehatan kami tetap melakukan musyawarah dan sosialisasi dengan masyarakat, atau kami juga menggunakan media sosial</i>	
	KT	<i>itu tadi mbak, kami melakukan penyesuaian, apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana kami bisa</i>	

			<i>melaksanakannya tanpa merasa pihak lain dirugikan</i>	
		AD	<i>setelah penyesuaian kami bekerja dan menjalankan semaksimal mungkin dan tanggap pada masalah atau kendala yang nantinya akan dihadapi</i>	
4	bagaimana pemerintah berusaha menyesuaikan realokasi dan refocusing anggaran sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan regulasi yang ada ?	SH	<i>banyak program dari pemerintah dan juga dana yang telah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, seperti salah satu programnya yaitu: desa tanggap covid dan juga jaring pengaman sosial serta adanya program BLT DD ini mbak. Dan inikan kami cuma ikut aturan dan anjuran pemerintah. Jadi gak susah penyesuainnya, apalagi masyarakat kami ini terbuka</i>	Program dari pemerintah dan juga dana yang telah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, seperti salah satu programnya yaitu: desa tanggap covid dan juga jaring pengaman sosial serta adanya program BLT DD. Dan inikan kami cuma ikut aturan dan anjuran pemerintah. Jadi gak susah penyesuainnya dan didukung oleh keterbukaan masyarakat. Tidak ada kendala yang besar yang sampai merubah ketetapan, pemerintah melaksanakannya efektif dan semaksimal mungkin
		MH	<i>nah yang telah saya katakan sebelumnya mbak, kami juga ya istilahnya mengambil hati masyarakat dengan bilang kalo ini perubahannya emang diseluruh dunia. Dan pemulihannya dampak dari pandemi sebagai fokus utama. Selama berjalan sampai tahun kedua ini alhamdulillah semua masih berjalan lancar mbak. Tidak ada kendala yang besar yang sampai merubah ketetapan</i>	
		GA	<i>dari yang awalnya besaran DD untuk pembangunan masyarakat dan desa sekarang harus dialokasikan untuk penanganan pandemi, seperti adanya desa tanggap covid dan juga bantuan untuk mereka yang perekonomian ataupun terinfeksi covid-19</i>	
		AS	<i>seperti yang saya bilang sebelumnya, refocusing kami untuk menangani dampak pandemi. Baik dalam desa</i>	

			<i>tanggap covid, maupun bantuan lainnya</i>	
		HA	<i>kami sesuaikan dengan peraturan yang ada mbak, apapun bentuk programnya itu. Ya kami kan pemerintah desa harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi kami melakukan efektif dan semaksimal mungkin.</i>	
		KT	<i>penyesuaian ini nggak susah mba, kami mengganti saja yang pertamanya untuk pembangunan kami ganti menjadi pencegahan dampak pandemi</i>	
		AD	<i>kami pemerintah desa mengikuti aturan dan regulasi yang ada mbak, apapun itu kami berusaha menjalankannya semaksimal mungkin.</i>	
5	pemerintah membantu masyarakat desa dengan adanya beberapa bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, baik ekonominya ataupun individu yang	SH	<i>Kami melakukannya dengan musyawarah mbak, seperti yang mbak tadi katakan bahwasannya seluruh masyarakat terdampak ekonominya, jadi kami berusaha mencari yang benar-benar terdampak pandemi dan ditambah dengan kriteria-kriteria prioritas yang ditetapkan regulasi</i>	Pemerintah desa menggunakan skala prioritas dalam setiap kriteria yang telah ditetapkan oleh regulasi, dan ini, mengupayakan untuk kontribusi berbagai pihak termasuk masyarakat serta meminta bantuan dari seluruh lapisan termasuk RT untuk mencoba mencari nama-nama yang dianggapnya paling kurang mampu dan terdampak pandemi di lingkup masyarakatnya dalam setiap program dan pengambilan keputusan (musyawarah) . Selama semua setuju seluruhnya akan berjalan dengan baik
		MH	<i>kami dari ataskan udah nerima data mengenai kriteria atau syarat mereka calon penerima bantuan dan yang lainnya. kami berusaha semaksimal mungkin berusaha memilih yang paling masuk dengan kriterianya. Alhamdulillah-nya masyarakat menerima mbak, hasil keputusan ini</i>	
		GA	<i>ini juga termasuk dalam kendalanya ya mbak, tapi kami upayakan untuk kontribusi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam setiap program dan pengambilan keputusan. Selama semua setuju seluruhnya akan berjalan dengan baik</i>	
		AS	<i>setelah kriteria yang sudah disesuaikan kami mulai</i>	

	terinfeksi. Bagaimana cara pemerintah desa membagi kepada masyarakat, dikarenakan seluruh lapisan masyarakat yang merasa terdampak pandemi ini ?		<p><i>memilih masyarakat yang dianggap masuk ke dalam skala prioritas bantuan kami pilih. Sekali lagi kami menegaskan, pemilihan penerima bantuan atas usul bersama dalam musyawarah</i></p> <p>HA <i>berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi kami menurut mbak, apalagi nanti kalau ternyata banyak masyarakat yang termasuk dalam kriteria</i></p> <p>KT <i>ini tantangan ya mbak, jadi kami coba meminta bantuan dari seluruh lapisan termasuk RT untuk mencoba mencari nama-nama yang dianggapnya paling kurang mampu dan terdampak pandemi di lingkup masyarakatnya</i></p> <p>AD <i>kami berusaha menentukannya dengan musyawarah, yang disahkan oleh seluruh lapisan desa termasuk masyarakat.</i></p>	
6	bagaimana pemerintah desa dalam proses perencanaan program BLT DD? Dan apakah ada kendala ?	SH	<i>Karena BLT DD ini merupakan skala prioritas pemanfaatan Dana Desa 2021, ya kami nurut mbak. Kami rencanain KPM yang akan menerima bantuan ini berapa KK beserta jumlah anggarannya. Kalau kendalanya sih tidak ada mbak. Kami juga dalam nentuin jumlah ini ya musyawarah sama seluruh perangkat yang ada. Bulan januari kami serahkan nama-nama calon penerima (KPM) beserta NIK atau KK, dan alamatnya. Data KPM kami usulkan ke pusat, lalu approved sehingga masuk anggaran 2021</i>	Pemerintah Desa merencanakan jumlah KPM yang akan menerima bantuan ini berapa KK beserta jumlah anggarannya. Kami juga dalam nentuin jumlah ini ya musyawarah sama seluruh perangkat yang ada. Bulan januari kami serahkan nama-nama calon penerima (KPM) beserta NIK atau KK, dan alamatnya. Data KPM diusulkan ke pusat, lalu approved sehingga masuk anggaran 2021. Kendala dalam perencanaan BLT DD tidak ada, kami kan ikut regulasi yang ada. Lalu di Tahap I dana dari pusat turun sesuai dengan yang dianggarkan dan langsung dibagikan ke KPM.
		MH	<i>kalau kendala tidak ada, kami kan ikut regulasi yang ada. Pemerintah nyuruh buat program ini, kami buat. Kami</i>	

			<i>tentukan anggaran dan total penerimanya berapa. awal tahun 2021 kami setorkan nama-nama KPM beserta NIK, KK dan alamatnya. Lalu di Tahap I dana dari pusat turun sesuai dengan yang dianggarkan dan langsung dibagikan ke KPM</i>	
		GA	<i>mula nya kami dapat arahan kan mbak, melalui regulasi untuk tahun anggaran 2021, setelah ini kami mulai bermusyawarah untuk nentuin berapa anggaran untuk BLT DD. Soal kendalanya gaada, sudah runtut. Setelah itu kami laporkan nama-nama ke pusat</i>	
		AS	<i>karna pusat minta dan bilang program ini wajib, kami berusaha membagi berapa anggaran untuk BLT DD 2021 melalui musyawarah desa. Kalau kendalanya tidak ada dari dulu untuk program pemerintah sama prosesnya</i>	
		HA	<i>musyawarah,dalam satu tahun 2021 tu yang mau dijalankan apa saja. Total anggarannya juga berapa. Di musyawarah itu kami netapinnya mbak</i>	
		KT	<i>diskusi dalam musa, dan disana dibilang dan disahkan kalo jumlahnya segini gitu</i>	
		AD	<i>ada panduan regulasi untuk tahun anggaran 2021 mbak. Jadi disana kami diminta menganggarkan program BLT DD. Nah jumlah KPM nya kami musyawarah, Soal kendalanya gaada</i>	
8	Apakah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi	SH	<i>untuk seluruh program-program pemerintah yang ada kami selalu melakukan sosialisasi mba. Sosialisasi kami undang perwakilan masyarakat untuk datang ke balai desa, dan menyampaikannya ke masyarakat dalam setiap perkumpulan RT</i>	Seluruh pemerintah desa menegaskan bahwasannya selalu melakukan sosialisasi atas setiap program pemerintah yang dilakukan di balai desa, melalui RT dengan perkumpulan RT, Perkumpulan minggu an, bulanan atau rutin. Pernyataan ini juga didukung oleh

	mengenai program BLT kepada masyarakat?	MH	<i>sosialisasi selalu kita lakukan, apapun itu. Kadang kami melakukannya dalam acara, seperti acara bersama desa, musyawarah rutin dan perkumpulan lainnya.</i>	KPM bahwasannya mereka mendengar sosialisasi langsung dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
		GA	<i>sosialisasi program selalu menjadi keharusan bagi kami mba</i>	
		AS	<i>iya mbak sosialisasi. Ada yang kami sosialisasikan langsung ke masyarakat. Ada juga kami minta RT untuk sosialisasikan saat perkumpulan RT</i>	
		HA	<i>iya mbak ada sosialisasi, baik pemerintah desa langsung, atau bersama perkumpulan mingguan mbak</i>	
		KT	<i>pasti ada sosialisasi program pemerintah</i>	
		AD	<i>sosialisasi program selalu menjadi keharusan bagi kami mba</i>	
		DW	<i>iya mbak, emang sebelumnya juga ada sosialisasi tapi ya mungkin sosialisasinya buat kami yang kurang mampu aja</i>	
		T	<i>iya, sosialisasi ada</i>	
		HR	<i>ada dari desa</i>	
		WR	<i>iya mbak, emang sebelumnya juga ada sosialisasi</i>	
		AM	<i>iya mbak, ada</i>	
		SM	<i>iya ada Mbak</i>	
		KR	<i>ada mbak, saya juga datang kemarin</i>	
9	Bagaimana cara penentuan KPM oleh pemerintah desa ? dari tahap	SH	<i>kami yang di kantor ini untuk mencari yang miskin nggak mungkin, jadi kami kumpulkan perangkat desa, pak RT dan pak kadun itu untuk melaksanakan musyawarah di tingkat RT untuk mengusulkan warganya yang memang belum mendapat bantuan. Nah baru, dibikin berita acara dan dibawahlah ke desa dari masing-masing RT, baru diverifikasi desa oleh bagian Kasi Kesejahteraan. Nah</i>	Desa menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas

pengumpulan data, konsolidasi dan verifikasi dan proses validasi dan penetapan hasil pendataan ?		<i>disitu nanti terlihat apakah orang tersebut sudah terdaftar dalam bantuan lain nanti ditandai. Lalu diadakan musyawarah desa khusus yang membahas mengenai BLT DD, yang diselenggarakan oleh BPD. Nama-nama masyarakat yang diketahui sudah menerima bantuan ditandai dan dikembalikan ke RT. Dan untuk data masyarakat lainnya diverifikasi kembali dan diambil dengan menggunakan skala prioritas</i>	Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. pelaksanaan program dimulai dengan kepala desa memberikan tugas kepada ketua RT, RW dan BPD untuk menentukan nama-nama calon penerima KPM dari tingkat RT, dikarenakan setiap RT hanya menaungi 30-40 kk maka dirasa mampu meng-cover dan mengetahui seluk beluk ekonomi masyarakatnya, nama—nama yang telah terpilih oleh RT selanjutnya dibawakan ke perkumpulan RT yang dihadiri seluruh KK , RW dan perwakilan BPD, di perkumpulan ini RT menyebutkan nama-nama tersebut, dan membuka sesi diterima atau apakah ada masyarakat lain yang keberatan atau tidak. Setelah nama-nama tersebut disetujui, RT membawa nama tersebut ke Musdesus yang dihadiri oleh seluruh RT, RW, Kadun, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi lainnya. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima. Kita bersama BPD, RT, Kadun, perangkat juga dan pak kades serta perwakilan masyarakat menentukan siapa-siapa saja yang mendapat bantuan BLT DD
	MH	<i>Dalam musyawarah desa khusus untuk memverifikasi masyarakat yang terdaftar atau termasuk kriteria penerima BLT DD (karena masyarakat atau KK nya sedikit, maka pemerintah desa terjun langsung dalam penentuan KPM. Dan apabila dibulan selanjutnya kita melihat KPM ini sudah meningkat ekonominya maka kita alihkan ke yang lain</i>	
	GA	<i>Pertama kami melalui rapat RT, Musyawarah dusun yang membuat seluruh RT nya mengirimkan nama nama masyarakatnya dan nama-nama yang sudah terverifikasi tadi dibawa ke musyawarah desa (Musdesus). melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima. Kita bersama BPD, RT, Kadun, perangkat juga dan pak kades serta perwakilan masyarakat menentukan siapa-siapa saja yang mendapat bantuan BLT DD</i>	
AS	<i>Membentuk gugus tugas yang terbentuk dari Pak RT, Kadun dan BPD. Dengan Bapak RT yang tahu persis</i>		

			<p>masyarakat atau lapangannya. Dan harus sesuai dengan kriterianya. Dan mereka harus tidak boleh menerima bantuan lain sebelumnya. Dan setelah itu kita lakukan musyawarah desa khusus, semua RT datang, tokoh masyarakat, pak kadun BPD dan memverifikasi siapa saja KPM yang diterima Desa sesuai dengan skala prioritas desa. Pihak kecamatan, pendamping desa, koramil dan lain lain yang melekat kerja sama dengan kita secara demokratis. Saya selaku kepala desa, tidak berintervensi atau menitipkan nama seseorang untuk masuk sebagai penerima atau menjadi KPM BLT DD. Tokoh masyarakat dari perwakilan tersebut menerima aklamasi dan ketetapan dan insyaallah tidak ada masalah</p>	
		HA	<p>Proses pemilihan KPM: melalui musyawarah desa yang mengundang pak RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat dengan mengundang seluruh elemen</p>	
		KT	<p>Untuk proses penentuan KPM secara mudesus penetapan KPM BLT DD, dengan verifikasi DTKS yang ada, kan tidak semua yang terdata di DTKS itu mendapat program (bantuan) jadi kita usulkan yang terdaftar dulu baru kita lihat mereka yang masuk kriterianya tetapi sama sekali belum mendapat bantuan apapun. Ketua RT menyampaikan calon KPM lalu kita validasi bersama sama dengan silang antar RT. Karena kondisi masyarakat di RT itu berbeda beda</p>	
		AD	<p>Ini kaitan dengan kesepakatan harus dimulai dari bawah, kemudian mudesus untuk penetapan KPM BLT DD. RT, BPD, Kadun dan masyarakat dan semua kumpul. Untuk</p>	

			<i>mengumpulkan atau mengajukanlah istilahnya masyarakat atau calon-calon KPM. Nah disitu kami bermusyawarah dalam pemilihan KPM dengan skala prioritas</i>	
		JS	<i>Pelaksanaan program dimulai dengan kepala desa memberikan tugas kepada kami untuk menentukan nama-nama calon penerima KPM dari tingkat RT, dikarenakan setiap RT hanya menaungi 30 kk maka mengetahui jelas seluk beluk ekonomi masyarakatnya, nama—nama yang telah terpilih selanjutnya dibawakan ke perkumpulan RT seperti arisan RT yang dihadiri seluruh KK , RW dan perwakilan BPD, di perkumpulan ini RT menyebutkan nama-nama tersebut, dan membuka sesi diterima atau apakah ada masyarakat lain yang keberatan atau tidak. Setelah nama-nama tersebut disetujui, saya membawa nama tersebut ke Musdesus yang dihadiri oleh seluruh RT, RW, Kadun, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi lainnya</i>	
10	Apakah pemerintah desa membentuk gugus tugas atau petugas BLT DD untuk mendata KPM ?	SH	<i>Gugus tugas atau petugas BLT DD tidak ada, jadi pemerintah desa langsung meminta RT, Kadun dan BPD dan perangkat desa lainnya yang mawadahi pelaksanaan BLT DD</i>	Pemerintah desa tidak membentuk gugus tugas melainkan memberikan tugas langsung kepada ketua RT, RW dan juga Kadun dalam proses pemilihan KPM
		MH	<i>pemerintah terjun langsung memilih KPM, karena kan di desa Gunung Payung ini tergolong sedikitlah KK nya dibandingkan dengan desa yang lain</i>	
		GA	<i>kami langsung meminta RT, Kadun dan BPD mbak, tidak ada sih kalau membentuk tim khusus sendiri. Itu pun mereka sudah menjadi tupoksinya</i>	
		AS	<i>Tidak ada gugus tugas mbak, kami serahkan dan</i>	

			<i>amanahkan ke RT untuk memilih masyarakatnya yang layak</i>	
		HA	<i>Gugus tugas atau petugas BLT DD tidak ada, jadi pemerintah desa langsung meminta RT, Kadun dan BPD dan perangkat desa lainnya yang mewadahi pelaksanaan BLT DD</i>	
		KT	<i>Gugus tugas atau petugas BLT DD tidak ada, Sudah menjadi tugas RT, Kadun dan BPD dalam penentuan KPM</i>	
		AD	<i>tidak mbak, langsung dari bawah dari tingkat RT, Kadun dan BPD yang berembuk calon KPM diskala paling bawah nanti dibawa ke desa</i>	
11	Apakah ada hambatan khusus dalam proses penentuan dan perencanaan KPM ?	SH	<i>InsyaAllah mbak, di musdesus kami kumpulkan semua pihak terkait BLT DD dan kami memilih KPM dengan menggunakan skala prioritas dan mendahulukan yang memang teratas dari kriteria yang termasuk. Pemerintah desa jika diminta menuruti semua maunya masyarakat ya pasti tidak akan terpenuhi. Karena yang paham masyarakatnya itu pak RT, yang membawahi 20 KK. Dan itu masih bisa tercover. Dan jika ada masyarakat yang komplain ke desa, kita lihat apa mereka terlewat oleh pak RT maka kita akan verifikasi ulang dan kalau standar kita akan tetap mengacu pada musyawarah desa tersebut. Tapi tidak ada mbak</i>	Tidak ada hambatan khusus dalam penentuan dan perencanaan KPM , KPM dengan menggunakan skala prioritas dan mendahulukan yang memang teratas dari kriteria yang termasuk. Dan jika ada masyarakat yang komplain ke desa, kita lihat apa mereka terlewat oleh pak RT maka kita akan verifikasi ulang dan kala standar kita akan tetap mengacu pada musyawarah desa tersebut. RT yang paling mengetahui mana masyarakat yang belum mampu dan juga belum menerima bantuan lain sebelumnya, jadi insyaallah nama-nama yang saya bawa bisalah dipertanggungjawabkan
		MH	<i>secara keseluruhan tidak ada sih mbak</i>	
		GA	<i>tidak ada sampai sekarang</i>	
		AS	<i>Insyaallah tidak ada masalah, yang menetapkan bukan pemerintah desa tetapi dari bawah. Dari RT, kadun dan BPD</i>	

		HA	<i>tidak ada mbak</i>	
		KT	<i>tidak ada mbak</i>	
		AD	<i>tidak ada mbak, sesuai hasil dan verifikasi di musdesus</i>	
		JS	<i>tidak ada ya mbak, kan sebelum ditetapkan itu saya membawa kurang lebih 10 nama calon penerima. Disitu saya sebagai RT kan juga tau mana masyarakat yang belum mampu dan juga belum menerima bantuan lain sebelumnya, jadi insyaallah nama-nama yang saya bawa bisalah dipertanggungjawabkan</i>	
		ST	<i>saya sebagai BPD ya mbak ikut terkait dalam penentuan KPM, ya setahu saya itu sudah menjadi tugas RT dalam pemilihan masyarakatnya, yang memang RT yang tau seluk beluk dan ekonomi KK lah istilahnya, jadi ya saya mengikuti regulasi yang ada dalam pemilihan KPM, kalau dari saya tidak ada permasalahan umum dan khusus mbak. Kalau semua setuju ya sah-sah saja</i>	
		SR	<i>tidak ada mbak, setelah setiap RT memilih masyarakatnya yang termasuk kriteria penerima, kami berembuk dulu mbak, nah dipilih-pilih lagi yang mana bakal penerima paling utama, dan mana yang masih bisa dieliminasi. Nama-nama yang terpilih ini nantinya akan dibawa ke desa dalam musdesus</i>	
12	Bagaimana urutan pelaporan program ?	SH	<i>setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten</i>	setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten
		MH	<i>setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami</i>	

			<i>bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten mbak, mungkin juga semua desa juga gini pelaporannya</i>
		GA	<i>ya seperti yang saya bilang sebelumnya mbak, setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten mbak</i>
		AS	<i>Hari ini kita realisasikan, bersama dokumentasi penerima, foto itu baru kita laporkan ke pihak kecamatan dan kabupaten</i>
		HA	<i>Setelah kami bagikan dengan ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten</i>
		KT	<i>setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten</i>
		AD	<i>setelah dana turun ke kas desa, selang 1-2 hari kami bagikan. Setelah ada dokumentasi berupa foto tanda tangan dan syarat yang mengharuskan sudah vaksin, KK dan NIK langsung kami laporkan ke kecamatan dan juga kabupaten</i>

13	Apakah ada kendala dalam pelaporan program BLT DD	SH	<i>Laporan BLT DD, begitu selesai langsung dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten dan setelah pemberian ke KPM langsung kita laporkan. Untuk masalah atau hambatannya, tidak ada mbak</i>	Tidak ada kendala dalam pelaporan
		MH	<i>tidak ada mbak, setelah direalisasikan ke KPM langsung kami buat laporannya</i>	
		GA	<i>tidak ada mbak, setelah diberikan ke KPM ya langsung buat laporannya dan Tidak ada permasalahan khusus</i>	
		AS	<i>Kendala khusus dalam pelaporan tidak ada dan sesuai dengan nomor induk KK dan aplikasi nasional dilaporkannya</i>	
		HA	<i>Untuk masalah atau hambatannya, tidak ada mbak</i>	
		KT	<i>begitu selesai direalisasikan langsung dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten dan setelah pemberian ke KPM langsung kita laporkan. Untuk masalah atau hambatannya, tidak ada mbak</i>	
		AD	<i>Laporan BLT DD, begitu selesai langsung dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten dan setelah pemberian ke KPM langsung kita laporkan. Untuk masalah atau hambatannya, tidak ada mbak</i>	
14	bagaimana cara pemerintah desa menilai bahwa program BLT DD yang telah	SH	<i>kalau sudah dibuktikan dengan data KPM yang sesuai dengan kriteria, kami cepat realisasi dan pelaporannya, menurut kami hal tersebut sudah membuktikan program ini berhasil mbak</i>	Pemerintah desa menilai jika sudah tidak ada kendala apapun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya didukung oleh KPM yang sesuai dengan kriteria, kami cepat realisasi dan pelaporannya maka program dapat dikatakan berhasil.
		MH	<i>apapun bentuk programnya kalau setiap proses gak ada kendalanya pasti berhasil mbak</i>	
		GA	<i>kalau semuanya sudah sesuai sama yang ada di peraturan dan gak ada kendala apapun, berhasil mbak</i>	

	terlaksana sudah berhasil atau belum?	AS	<i>program ini berhasil mbak. Gak ada kendala dalam proses pelaksanaan, musyawarah sama laporannya juga gak ada. Valid kalo program ini berhasil</i>	
		HA	<i>Semua sesuai dengan peraturan dan regulasi ya ada. Jika semua valid seperti yang terlaksana maka kami sampaikan program BLT DD berhasil mbak</i>	
		KT	<i>Sesuai KPM, Cara menentukannya, pelaksanaannya serta pelaporannya, kami rasa berhasil</i>	
15	Bagaimana tanggapan pemerintah desa, jika ada masyarakat yang komplain karena tidak termasuk penerima program BLT DD ini padahal termasuk dalam kriterianya?	SH	<i>Dan jika ada masyarakat yang komplain ke desa, kita lihat apa mereka terlewat oleh pak RT maka kita akan verifikasi ulang dan kalau standar kita akan tetap mengacu pada musyawarah desa tersebut. Tapi sejauh ini tidak ada mbak</i>	Jika mereka terlewat oleh pak RT maka kita akan verifikasi ulang dan kalau standar kita akan tetap mengacu pada musyawarah desa tersebut. Yang tergolong Lansia, buruh tani, sakit menahun miskin, dll, yang tentunya juga menggunakan skala prioritas di saring dengan penetapan KPMnya selalu dengan ketentuan yang ada jadi masyarakat yang komplain mengerti bahwa ada yang lebih masuk dalam kriteria
		MH	<i>Tidak ada masyarakat yang komplain mbak.</i>	
		GA	<i>Tidak ada keluhan atau komplain dari masyarakat. Dan pemerintah desa berupaya memberikan penjelasan bahwa masih ada KPM yang memenuhi kriteria yang berada dibawahnya</i>	
		AS	<i>Alhamdulillah ngga ada, KPM yang sudah mampu akan diganti dengan KPM yang lainnya dengan kriteria spesifik</i>	
		HA	<i>Ada masyarakat complain, dan sudah dibicarakan di musyawarah desa, ya namanya juga anggaran tidak akan bisa mencukupi keseluruhannya, tetap Pemerintah desa juga menggunakan skala prioritas</i>	
		KT	<i>Ada warga yang compalin, jadi data yang ada itu kita saring dari tingkat RT yang lebih tahu masyarakatnya. Yang tergolong Lansia, buruh tani, sakit menahun miskin, dll, ya tentunya juga make skala prioritas di saring dengan penetapan KPMnya selalu dengan ketentuan yang ada jadi</i>	

			<i>masyarakat yang compalin mengerti bahwa ada yang lebih masuk dalam kriteria</i>	
		AD	<i>Dan jika ada masyarakat yang complain ke desa, kita lihat apa mereka terlewat oleh pak RT maka kita akan verifikasi ulang dan kalau standar kita akan tetap mengacu pada musyawarah desa tersebut. Tapi sejauh ini tidak ada mbak</i>	
16	Apakah jumlah uang yang diberikan sudah sesuai dengan yang diterima?	SH	<i>sesuai dengan PMK, 300 ribu selama setahun mbak</i>	Jawaban sesuai dengan regulasi yaitu 300 ribu per bulan selama satu tahun.
		MH	<i>300 ribu selama setahun mbak</i>	
		GA	<i>300 ribu sebulannya selama 1 tahun</i>	
		AS	<i>300 ribu mbak, genap kami realisasikan</i>	
		HA	<i>Realisasi sesuai mbak, 300 ribu</i>	
		KT	<i>300 ribu per bulan</i>	
		AD	<i>300 ribu sebulan dalam setahun mbak</i>	
		DW	<i>tiga ratus ribu mbak perbulannya</i>	
		T	<i>tiga ratus ribu perbulannya</i>	
		HR	<i>tiga ratus ribu perbulan</i>	
		WR	<i>tiga ratus ribu setiap bulan</i>	
		AM	<i>tiga ratus ribu</i>	
		SM	<i>tiga ratus ribu mbak perbulan</i>	
KR	<i>tiga ratus ribu mbak</i>			
17	Apakah pemerintah desa juga tau, untuk apa bantuan ini digunakan oleh KPM ?	SH	<i>untuk tambah-tambah pemenuhan kebutuhan mbak, ya begitulah jawabannya kalau kami tanya</i>	Untuk tambah-tambah pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sekolah anak.
		MH	<i>kalau ditanya ke KPM, ya untuk tambah pemenuhan ekonomi keluarga dan sekolah anak</i>	
		GA	<i>kebanyakan untuk tambah pemenuhan ekonomi keluarga mbak</i>	
		AS	<i>sebagian besar mereka gunakan untuk tambah-tambah pemenuhan kebutuhan mbak</i>	

		HA	<i>Kebanyakan KPM menggunakan dana BLT DD secara umum, digunakan untuk kebutuhan pangan, kebanyakan untuk kebutuhan rumah tangga</i>	
		KT	<i>pemenuhan kebutuhan ekonomi mbak</i>	
		AD	<i>untuk tambah-tambah pemenuhan kebutuhan mbak, ya begitulah jawabannya</i>	
18	Adakah syarat khusus kepada KPM dalam pengambilan bantuan ini	SH	<i>Potokopi KK, KTP dan bukti sudah vaksin minimal vaksin 1</i>	Potokopi KK, KTP dan bukti sudah vaksin minimal vaksin 1
		MH	<i>Potokopi KK, KTP dan bukti sudah vaksin mbak</i>	
		GA	<i>Potokopi KK, KTP dan sudah vaksin sesuai anjuran pemerintah</i>	
		AS	<i>Potokopi KK, KTP dan bukti sudah vaksin mbak</i>	
		HA	<i>Potokopi KK, KTP dan sudah vaksin</i>	
		KT	<i>Potokopi KK, KTP dan telah melakukan vaksinasi</i>	
		AD	<i>Potokopi KK, KTP dan sudah vaksin</i>	
20	Apakah target dan sasaran program BLT DD sudah sesuai dengan kriteria yang ada atau sudah tepat sasaran, bagaimana pembuktian	SH	<i>InsyaAllah mbak, kami menggunakan perbandingan data DTKS dan koordinasi langsung dengan RT</i>	Sudah tepat sasaran , yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PMK dan regulasi yang ada, berpedoman pada DTKS dan juga ketua RT yang terjun langsung memilih masyarakat yang belum terdaftar dalam bantuan lain namun memenuhi kriteria.
		MH	<i>sudah, dimana sebelum ditetapkannya KPM kami juga meminta koordinasi dan juga persetujuan dari berbagai pihak dan juga berdasar pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh PMK, ditandai tidak adanya komplain dari masyarakat lain</i>	
		AS	<i>insyaallah sudah ya mbak, kita kan juga nentuin KPM ngga asal-asalan. Jadi semua pihak juga berunding dan musyawarah dalam musdesus jadi ya semua taulah mana masyarakat yang masuk KPM atau masih tergolong mampu</i>	
		HA	<i>sudah mbak, dengan cek data dari lingkup data yang</i>	

	nya?		<i>melihat ekonominya bagaimana. Pak RT dapat menaungi KK dalam satu RT yang termasuk tidak banyak mbak</i>	
		AD	<i>bisa dibilang sudah mbak, di musdesus kami kumpulkan semua pihak terkait BLT DD dan kami memilih KPM dengan menggunakan skala prioritas dan mendahulukan yang memang teratas dari kriteria yang termasuk kriteria dalam regulasi dan PMK</i>	
21	Apa langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengangant isipasi salah sasaran penerima ?	SH	<i>ya itu tadi mbak, panduan yang utama ya menggunakan DTKS nah bagi masyarakat yang belum menerima bantuan kami usulkan dan juga selain DTKS kami memilih masyarakat lainnya yang termasuk dalam kriteria KPM (lansia, sakit menahun, miskin dll) kami verifikasi kembali</i>	panduan yang utama ya menggunakan DTKS nah bagi masyarakat yang belum menerima bantuan kami usulkan dan juga selain DTKS kami memilih masyarakat lainnya yang termasuk dalam kriteria KPM (lansia, sakit menahun, miskin dll) kami verifikasi kembali
		MH	<i>dengan menggunakan DTKS sih mbak, juga dengan ya latar belakang calon KPM diperlukan. Apalagi kan KK disini gabanyak jadi ya bisa di cover</i>	
		AS	<i>karena dari usulan dari RT yang telah dan bisa tahu menahu masyarakatnya, kami berusaha percaya dengan membandingkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan RT sebelumnya dalam musdesus. Ya berpatok juga pada data DTKS dan latar belakang ekonomi dan kesehatannya juga mba</i>	
		HA	<i>ya latar belakang ekonomi tidak disebutkan karna sudah ada NIK dan KK. Insyaallah tidak ada masalah, yang menetapkan bukan pemerintah desa tetapi dari bawah. Dari RT, kadun dan BPD, Kalau dikami insyaallah tidak ada sangkut paut pemerintah untuk KPM sesuai dengan kriteria dan ada juga yang terdaftar di DTKS namun belum mendapat bantuan apapun</i>	

		AD	<i>DTKS dan masyarakat yang belum ada di dalamnya kami data ulang</i>	
22	Apakah anda sebagai KPM merasa terbantu dengan adanya program ini? Dan apakah anda menerima bantuan lain selain bantuan ini	DW	<i>alhamdulillah sangat terbantu mbak, belum mbak ini yang pertama</i>	Para KPM mengungkapkan bahwasannya mereka merasa terbantu dengan adanya program ini dan KPM juga mengungkapkan bahwasannya ini merupakan bantuan pertama mereka. KPM puas dengan adanya program ini
		T	<i>ini yang pertama mbak. Dan bantuan ini saya jadi meraasa terbantu mbak. Tinggal nerima saja kok</i>	
		HR	<i>alhamdulillah, terbantu. Sebelumnya belum mbak</i>	
		WR	<i>merasa terbantu, ini pertama kali mbak</i>	
		AM	<i>terbantu mbak, belum mbak ini pertama</i>	
		SM	<i>terbantu mbak, ini bantuan pertama saya</i>	
		KR	<i>terbantu, ini yang pertama kali mbak</i>	
23	Selain terbantu apakah anda puas dengan pelaksanaan program BLT DD ?	DW	<i>puas mbak, kalau 300 ribu ini dikumoulin jadi setahun ya sangat terbantulah istilahnya</i>	
		T	<i>selain terbantu, kami juga puas mbak</i>	
		HR	<i>puas mbak, kalau dikompulin ya jadi banyak mbak</i>	
		WR	<i>cukup puas mbak, gede juga kalo sampai setahun</i>	
		AM	<i>cukup puas mbak, terbantu juga</i>	
		SM	<i>puas mbak, bisa mbantu ekonomi, lumayan</i>	
24	Dikarenakan pemberian dana	SH	<i>Jadwal pemberian ke KPM tidak rutin satu bulan sekali kami bagikan, tetapi setiap dana atau uang yang masuk ke kas desa langsung kami bagikan. Hanya selisih 1-2 hari</i>	Jadwal pemberian ke KPM tidak rutin satu bulan sekali kami bagikan, tetapi setiap dana atau uang yang masuk ke kas desa langsung kami bagikan.

bantuan ini tidak rutin setiap bulannya, apakah anda sebagai KPM merasa keberatan ?		<i>setelahnya. 2 bulan sekaligus. Masyarakatnya pengertian dan sebelumnya juga sudah disampaikan</i>	Hanya selisih 1-2 hari setelahnya. 2 bulan sekaligus. Masyarakatnya pengertian dan sebelumnya juga sudah disampaikan
	MH	<i>kalau dananya sudah cari dari atas yang langsung kami bagikan mbak tanpa diendap di desa</i>	
	GA	<i>awal sekali cair tahap I bulan Maret mbak, dilanjutkan dengan tahap II dan III</i>	
	AS	<i>pembagian ke KPM ya setelah dana turun ke kas desa nanti langsung kami bagikan ke KPM mbak, KPM kami undang ke Kantor dengan membawa KK/KTP dan KPM ini sesuai dengan anjuran pemerintah harus sudah vaksin</i>	
	HA	<i>Proses penyaluran: teknis penyaluran KPM diundang ke kantor desa dengan syarat sudah vaksin, KTP dan KK. Dana cair dari pusat ke kas desa langsung ke kas desa dan selang 1-2 hari kami realisasikan ke KPM</i>	
	KT	<i>Jadwalnya tidak rutin perbulan, tapi dana turun dari atas lalu selang sehari kami salurkan</i>	
	AD	<i>turun tahap I bulan Maret mbak, dan langsung kami bagikan tanpa ada dana yang mengendap di rekening desa</i>	
	DW	<i>kalau pemberiannya tidak rutin setiap bulan mbak, kami menerima bisa 3 atau dua bulan sekali. Tapi double gitu sesuai bulannya. Sebelumnya juga pemerintah sudah memberitahu mbak, kalau masih menunggu dana cair dari pemerintah</i>	
	T	<i>dikasihnya tidak setiap bulan, tapi jumlahnya lengkap saya terima 12 bulan</i>	
HR	<i>pemberiannya tidak rutin setiap bulan mbak, kami menerima bisa 3 atau dua bulan sekali dikali sama berapa bulan telatnya</i>		

		WR	<i>kalau pemberiannya tidak rutin setiap bulan mbak, kami menerima bisa 3 atau dua bulan sekali</i>	
		AM	<i>tidak setiap bulan saya nerima mbak, 2-3 bulan sekali</i>	
		SM	<i>penyalurannya tidak sebulan sekali tapi jumlahnya utuh mbak tiga ratus ribu sampe desember</i>	
		KR	<i>jatah setiap bulannya selalu ada mbak, tapi pembagiannya ada yang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekalian gitu mbak</i>	
24	Apakah dengan jumlah ini dapat membantu ekonomi keluarga, atau boleh saya tau digunakan untuk apa bantuan ini. Dan maaf sebelumnya, boleh saya tau apa pekerjaan anda?	DW	<i>ya, untuk tambah-tambah pemenuhan ekonomi mbak, namanya juga bantuan juga gak bisa dijadikan pokok. Saya IRT mbak, sedangkan suami petani</i>	KPM menggunakan uang bantuan ini untuk tambahan pemenuhan ekonomi keluarga dan sebagian besar KPM berkerja sebagai buruh tani
		T	<i>yaa, tambah jajan anak sama makan sehari-hari mbak. Saya IRT mbak kadang juga membantu suami di kebun</i>	
		HR	<i>tambah pemenuhan kebutuhan, jadi terbantu mbak. Saya cuma buruh tani mbak</i>	
		WR	<i>ya membantu ekonomi keluarga, saya IRT dan suami saya petani mbak</i>	
		AM	<i>membantu mbak, untuk anak sekolah sisanya ya untuk makan mbak. Disini saya buruh mbak sama suami</i>	
		SM	<i>ya, untuk tambah-tambah mbak, biaya sekolah anak juga</i>	
		KR	<i>walaupun tidak seberapa jumlahnya tapi cukup mbak untuk jajan anak</i>	
24	bagaimana anda menilai	SM	<i>Kalau menurut saya sudah baik ya mbak, ya walaupun saya tidak menerima bantuan ini tapi saya dapat infonya lewat perkumpulan RT, disana juga RT menjelaskan dan</i>	Pelaksanaan program BLT DD berjalan dengan baik , adanya sosialisasi dari pemerintah desa dan melalui RT, dan masyarakat tahu mengenai berita acara

	pelaksanaan BLT DD?		<i>menyebutkan nama-nama calon penerima. Kalaupun ada yang membuat usulan baru akan dimusyawarahin juga di perkumpulan tersebut. Kami setiap RT ini ada yang namanya arisan RT mbak, sebulan sekali. Nah disana juga RT melakukan sosialisasinya.</i>	hasil musdesus
		PR	<i>Saya rasa sudah baik mbak, yang menerima juga mereka yang tidak mampu, kebanyakan dari mereka itu orang tua mbak (RT 04 Desa Bukit Makmur)</i>	
25	apakah menurut anda KPM sudah tepat sasaran?	SM	<i>Sepertinya sudah mbak, kami juga lihat beritanya soal siapa aja yang menerima dalam satu desa, kami percaya sama proses pemilihannya</i>	Masyarakat mengatakan bahwasannya KPM sudah tepat sasaran
		PR	<i>Saya rasa juga sudah mbak</i>	

Lampiran 4

Dokumentasi KPM BLT DD 2021

KPM BLT DD Desa Bumi Harjo (D3)

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Jumlah Total yang diterima
1	Ngalinem	Lansia	RT 1 RW 1	3.600.000
2	Sumadi	Tani	RT 03 RW 01	3.600.000
3	Sularmi	Tani	RT 03 RW 02	3.600.000
4	Salimin	Tani	RT 01 RW 02	3.600.000
5	Mulginah	Lansia	RT 01 RW 03	3.600.000
6	Suliyem	Lansia	RT 01 RW 02	3.600.000
7	Rasmo	Tani	RT 02 RW 03	3.600.000
8	Kartoso	Lansia	RT 1 Jalan Raya	3.600.000
9	Tukimin	Tani	RT 02 RW 01	3.600.000
10	Wagino	Tani	RT 01 RW 01	3.600.000
11	Aris hartono	Tani	RT 03 RW 03	3.600.000
12	Pardi	Tani	RT 1 Jalan Raya	3.600.000
13	Iman	Tani	RT 03 RW 03	3.600.000
14	Wiryo rejo	Lansia	RT 1 Jalan Raya	3.600.000
15	Atmo rejo	Lansia	RT 1 Jalan Raya	3.600.000
16	Wakinem	Lansia	RT 01 RW 02	3.600.000
	Total			57.600.000

sumber: Pemerintah Desa Bumi Harjo

KPM BLT DD Desa Gunung Payung

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Total yang diterima
1	Rianto Mardiansyah	Gunung Payung	3.600.000
2	Sugeng Aribowo	Gunung Payung	3.600.000
3	Samsu Sahri	Gunung Payung	3.600.000
4	Widianto	Gunung Payung	3.600.000
5	Agus Prianto	Gunung Payung	3.600.000
6	Sri Wahyuni	Gunung Payung	3.600.000
7	Sarjudin	Gunung Payung	3.600.000
8	Ismail	Gunung Payung	3.600.000
9	Sondang Sau P	Gunung Payung	3.600.000
10	Hasan Basri	Gunung Payung	3.600.000
11	Agus Suneli	Gunung Payung	3.600.000
12	Rohana	Gunung Payung	3.600.000
13	Devi Hariya	Gunung Payung	3.600.000
14	Muhnara Weli	Gunung Payung	3.600.000
15	Ahmadi	Gunung Payung	3.600.000
16	Normawati	Gunung Payung	3.600.000
17	Suroto	Gunung Payung	3.600.000
18	Arianto	Gunung Payung	3.600.000
19	Jendro	Gunung Payung	3.600.000
20	Rita Efrianti	Gunung Payung	3.600.000
	Total		72.000.000

sumber: Pemerintah Desa Gunung Payung

KPM BLT DD Desa Air Sekamanak

No	Nama	Alamat	Jumlah Total yang diterima
1	Doni munandar	Dusun 1 RT 1	3.600.000
2	Kholil	Dusun 1 RT 1	3.600.000
3	Natim	Dusun 1 RT 2	3.600.000
4	Suyatno	Dusun 1 RT 2	3.600.000
5	Suwardi	Dusun 1 RT 3	3.600.000
6	Agus sugiyanto	Dusun 1 RT 3	3.600.000
7	Supriyanto	Dusun 2 RT 4	3.600.000
8	Rosiati	Dusun 2 RT 5	3.600.000
9	Udin saputra	Dusun 2 RT 6	3.600.000
10	Edi Nuryanto	Dusun 2 RT 6	3.600.000
11	R. Kosim	Dusun 2 RT 6	3.600.000
12	Alek Candra	Dusun 2 RT 7	3.600.000
13	Wahyudi	Dusun 3 RT 8	3.600.000
14	Yuni Ynto	Dusun 3 RT 8	3.600.000
15	Irwan	Dusun 3 RT 8	3.600.000
16	Imam Muklis	Dusun 3 RT 8	3.600.000
17	Sri Lestari	Dusun 3 RT 10	3.600.000
18	Heri Setiawan	Dusun 3 RT 10	3.600.000
19	Murniati	Dusun 3 RT 10	3.600.000
20	Narso	Dusun 4 RT 14	3.600.000
21	Karwati	Dusun 4 RT 14	3.600.000
22	Sutadi	Dusun 4 RT 14	3.600.000
23	Tusyah	Dusun 4 RT 14	3.600.000
24	Parimin	Dusun 4 RT 14	3.600.000
25	Rikin	Dusun 5 RT 15	3.600.000
26	Sayus	Dusun 5 RT 15	3.600.000
27	Marsono	Dusun 5 RT 15	3.600.000
Total			97.200.000

KPM BLT DD Desa Sumber Mulya (D7)

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah total yang diterima
1	Atmo rejo	Dusun 1	3.600.000
2	Kasemin	Dusun 1	3.600.000
3	Mulyadi	Dusun 1	3.600.000
4	Kasidi	Dusun 1	3.600.000
5	Sukiyem	Dusun 1	3.600.000
6	Purwanti	Dusun 1	3.600.000
7	Kasti	Dusun 1	3.600.000
8	Paiman	Dusun 1	3.600.000
9	Parto witono	Dusun 1	3.600.000
10	Katimin	Dusun 1	3.600.000
11	Parmi	Dusun 1	3.600.000
12	Mijem	Dusun 1	3.600.000
13	Warsi	Dusun 2	3.600.000
14	Paidi	Dusun 2	3.600.000
15	Marimin	Dusun 2	3.600.000
16	Darto	Dusun 2	3.600.000
17	Surip	Dusun 2	3.600.000
18	Painem	Dusun 2	3.600.000
19	Hadi suwito	Dusun 2	3.600.000
20	Sutikem	Dusun 2	3.600.000
21	Wasiyo	Dusun 2	3.600.000
22	Taman	Dusun 2	3.600.000
23	Mukimin	Dusun 2	3.600.000
24	Yunis	Dusun 1	3.600.000
25	Atmo sunarto	Dusun 1	3.600.000
26	Suharto	Dusun 1	3.600.000
27	Sakinah	Dusun 1	3.600.000
28	Jekson Efendi	Dusun 1	3.600.000
	Total		100.800.000

sumber: Pemerintah Desa Sumber Mulya

KPM BLT DD Desa Marga Bakti (D5)

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah total yang diterima
1	Paikem	Dusun 1	3.600.000
2	Katiyo	Dusun 1	3.600.000
3	Partu	Dusun 2	3.600.000
4	Kamin	Dusun 3	3.600.000
5	Sutiyem	Dusun 3	3.600.000
6	Toerah	Dusun 4	3.600.000
7	Giyo	Dusun 5	3.600.000
8	Tijem	Dusun 5	3.600.000
9	Yatno	Dusun 5	3.600.000
10	paimin	Dusun 5	3.600.000
11	Kardi	Dusun 6	3.600.000
12	Samiyem	Dusun 7	3.600.000
13	Tukinem	Dusun 7	3.600.000
14	Partin	Dusun 7	3.600.000
15	Erwin fauzi	Dusun 3	3.600.000
16	Mursi	Dusun 6	3.600.000
17	Kadi	Dusun 1	3.600.000
18	Rakiyem	Dusun 6	3.600.000
19	Tumiyem	Dusun 1	3.600.000
20	Imam Mahroji	Dusun 7	2.700.000
	Total		71.100.000

sumber: Pemerintah Desa Marga Bakti

KPM BLT DD Desa Bukit Makmur (D6)

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah total yang diterima
1	Painem	Jalan simpang lima	3.600.000
2	Sutego	Jalan simpang lima	3.600.000
3	Sri Pujiarto	Jalan lumba-lumba	3.600.000
4	Roida	Jalan lumba-lumba	3.600.000
5	Suraji	Jalan udang	3.600.000
6	Sumardi	Jalan hiu	3.600.000
7	Sunarto	Jalan hiu	3.600.000
8	Darmanto	Jalan mas	3.600.000
9	Agus surahwi	Jalan mas	3.600.000
10	Nurrohman	Jalan tawes	3.600.000
11	Siti aminatun	Jalan tawes	3.600.000
12	Sukirdi	Jalan tambera	3.600.000
13	Purwanti	Jalan tambera	3.600.000
14	Saniyah	Jalan indragiri	3.600.000
15	Kamto	Jalan indragiri	3.600.000
16	Cintra	Jalan pemuda	3.600.000
17	Tumirin	Jalan serayu	3.600.000
18	Indah budi lestari	Jalan serayu	3.600.000
19	Cokro	Jalan kapuas	3.600.000
20	Haryadi	Jalan progo	3.600.000
21	Pardi	Jalan progo	3.600.000
22	Sri susanti	Jalan ciliwung	3.600.000
23	Sriyani	Jalan citarum	3.600.000
24	Misdi	Jalan urai	3.600.000
25	Heru setyono	Jalan ogan	3.600.000
26	Paidi	Jalan urai	3.600.000
27	Bejo	Jalan air linggau	3.600.000
28	Miskan	Jalan hiu	3.600.000
29	Danu sulistiyo	Jalan ogan	3.600.000
30	Abdul hamid	Jalan simpang lima	3.600.000
	Total		108.000.000

sumber: Pemerintah Desa Bukit Makmur

KPM BLT DD Desa Bukit Harapan (D4)

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Laman	RT 2 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
2	Mesiran	RT 2 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
3	Slamet	RT 2 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
4	Suloso	RT 2 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
5	Santo	RT 3 Dusun I	Sakit Menahun
6	Priska	RT 8 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
7	Miyem	RT 6 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
8	Kolisah	RT 6 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
9	Katrisno	RT 6 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
10	Karmini	RT 7 Dusun I	Miskin, Belum terdata di DTKS
11	Edi Prayitno	RT 1 Dusun II	Terdaftar di DTKS, tetapi belum mendapat bantuan
12	Heri Purwanto	RT 1 Dusun II	Terdaftar di DTKS, tetapi belum mendapat bantuan
13	Ketijem	RT 3 Dusun II	Terdaftar di DTKS, tetapi belum mendapat bantuan
14	Sutinem	RT 6 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
15	Sugiyem	RT 7 Dusun II	Sakit Menahun
16	Sumanto	RT 8 Dusun II	Kehilangan pencaharian
17	Jupiter	RT 10 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
18	Sarno	RT 9 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
19	Tukino	RT 9 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
20	Sunarno	RT 4 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
21	Toni Herdianto	RT 3 Dusun II	Miskin, Belum terdata di DTKS
22	Amaryanto	RT 1 Dusun III	Miskin, Belum terdata di DTKS
23	Bonaji	RT 1 Dusun III	Sakit Menahun
24	M. Tohir	RT 2 Dusun III	Terdaftar di DTKS, tetapi belum mendapat bantuan
25	Wahyudi	RT 4 Dusun III	Miskin, Belum terdata di DTKS
26	Muji	RT 1 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
27	Katijan	RT 2 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
28	Martawan	RT 2 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
29	Nujauwati	RT 2 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
30	Sarmuji	RT 2 Dusun IV	Sakit Menahun
31	Didi Prayudi	RT 6 Dusun IV	Sakit Menahun
32	Randi Saputra	RT 6 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
33	Wahudi	RT 5 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
34	Martono	RT 7 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
35	Wawan	RT 8 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
36	Ahmanudin	RT 1 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
37	Ujang	RT 7 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
38	Rudiman	RT 7 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
39	Yukis	RT 6 Dusun IV	Miskin, Belum terdata di DTKS
40	Aji Semansa	RT 4 Dusun V	Miskin, Belum terdata di DTKS
41	Derahub	RT 2 Dusun V	Sakit Menahun
42	Danri	RT 1 Dusun V	Miskin, Belum terdata di DTKS
43	Riben	RT 3 Dusun V	Kehilangan pencaharian
44	Risben P	RT 4 Dusun V	Miskin, Belum terdata di DTKS

sumber: Pemerintah Desa Bukit Harapan

Lampiran 5

Dokumentasi wawancara dengan Pemerintah Desa Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara





Lampiran 6

Dokumentasi mudesus (Musyawarah desa khusus)



Dokumentasi pemberian dan wawancara BLT DD kepada KPM





Dokumentasi Rekaman

Kode Informan	Kode Rekaman	Jabatan	Nama Informan
01_MH	01_MH	Kades Gunung Payung	Muhamad Hatta
02_AS	02_AS	Kades Bumi Harjo	Agus Suhardi
03_HA	03_HA	Kades Bukit Makmur	Hartono
04_KT	04_KT	Kades Marga Bakti	Katno
05_AD	05_AD	Kades Air Sekamanak	Androngi
06_SH	06_SH	Sekdes Sumber Mulya	Sri Hanto
07_AT	07_AT	Sekdes Gunung Payung	Anton
08_IR	08_IR	Sekdes Bumi Harjo	Irwanto
09_SG	09_SG	Sekdes Marga Bakti	Sugianto
10_GA	10_GA	Kasi Kesejahteraan Bukit Harapan	Galih
11_DD	11_DD	Kasi Kesejahteraan Bukit Makmur	Dedi
12_JS	12_JS	Ketua RT	Jafar Shodiq
13_SR	13_SR	Kadun	Suhar
14_ST	14_ST	BPD	Siti
15_DW	15_DW	KPM	Dewi
16_T	16_T	KPM	Ita
17_HA	17_HA	KPM	Hamid
18_WR	18_WR	KPM	Warto
19_AM	19_AM	KPM	Ami
20_SM	20_SM	KPM	Sarmuji
21_KR	21_KR	KPM	Kartoso

Sumber: Hasil Penelitian